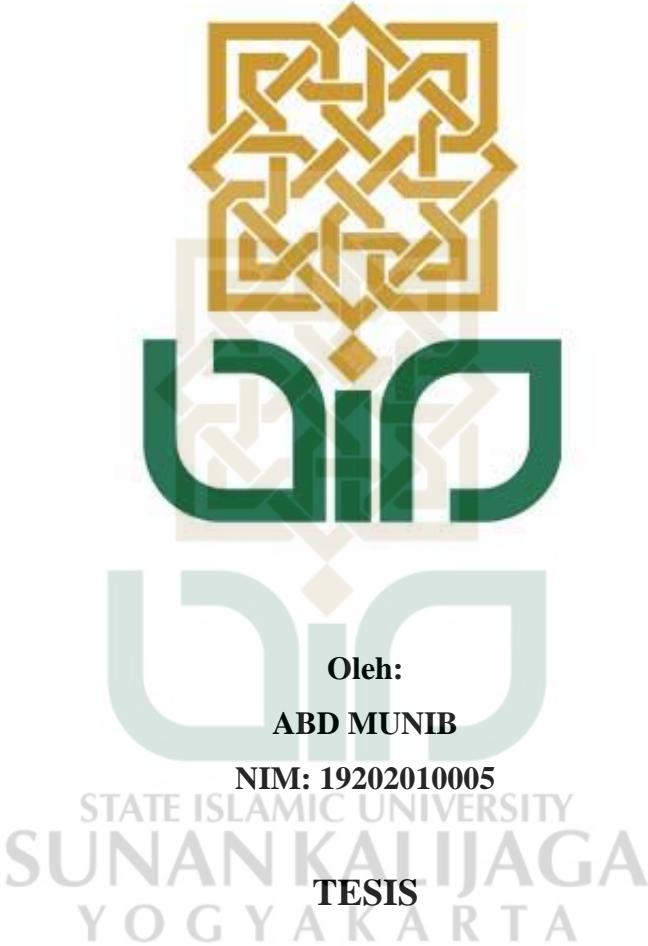


**DISKURSUS SERTIFIKASI KHOTIB:
PANDANGAN ORGANISASI KEAGAMAAN DI PAMEKASAN**



Diajukan kepada Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga
guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Magister Sosial

**YOGYAKARTA
2021**

Abstrak

Sertifikasi khotib yang diwacanakan Kemenag RI sejak 2017 sebagai upaya mencetak khotib profesional menuai pro-kontra di kalangan individu maupun kelompok. Kelompok organisasi keagamaan seperti SI, Muhammadiyah, dan NU Cabang Pamekasan juga memiliki narasi keagamaan dan kebangsaan serta logika berpikir yang berbeda tentang wacana program sertifikasi khotib ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tradisi fenomenologi dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam yang diperjelas dengan observasi serta penelusuran dukumen. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan narasi keagamaan dan kebangsaan. Narasi keagamaan SI menganggap wacana sertifikasi khotib bagian dari upaya menodai keluhuran tujuan dakwah itu sendiri. Narasi keagamaan Muhammadiyah menganggap bahwa program sertifikasi khotib menganggu misi kerasulan yang sekaligus berpotensi mempersempit ruang gerak khotib. Narasi keagamaan NU menganggap wacana sertifikasi khotib menjadi upaya pemerintah agar syiar Islam disampaikan oleh figur yang betul-betul memiliki pemahaman Agama mumpuni. Narasi kebangsaan Muhammadiyah menganggap program sertifikasi sebagai langkah berlebihan pemerintah untuk terlalu ikut campur mengatur wilayah yang sebaiknya tidak perlu disentuh. Narasi kebangsaan NU menganggap secara doktrinal negara memiliki otoritas sehingga program sertifikasi khotib pantas diakui dan dijalankan. Penelitian ini juga menunjukkan adanya penggunaan logika berpikir tersendiri yang diklasifikasikan pada poros, kesamaan, dan campuran pandangan. Poros pandangan ini terlihat dari SI yang menegaskan agar program sertifikasi khotib tidak dilanjut oleh pemerintah karena bertindisi menghalangi-halangi kegiatan dakwah. Adapun Muhammadiyah berpegang pada keyakinannya bahwa setiap khotib pada hakikatnya sudah mengerti tentang sumber Islam yang mengatur tata cara dalam cara menyampaikan pesan sehingga wacana sertifikasi ini dinilai tidak jelas fungsinya kecuali menambah beban. Sedangkan atas poros pandangan NU didasarkan pada kontribusi pemerintah untuk mewujudkan khotib profesional yang anti radikal dan ekstrimisme. Kesamaan pandangan SI, Muhammadiyah, dan NU tentang program sertifikasi khotib terletak pada praktiknya agar pemerintah atau Kemenag RI sekadar menjadi fasilitator. Artinya, pemerintah dan isnatansinya hanya cukup menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam mewujudkan penceramah profesional. Campuran pandangan tentang sertifikasi terlihat dari penggunaan isu lain yang sengaja dikait-kaitkan. SI mengaitkan wacana sertifikasi khotib dengan ketidak-puasan pemerintah terhadap konten ceramah yang kemudian menyebakan penceramah tersandung hukum. Muhammadiyah mengaitkan wacana sertifikasi khotib dengan rilis pemerintah terkait khotib radikal sehingga wacana sertifikasi khotib ini dinilai tidak akan transparan. NU mengaitkan wacana sertifikasi khotib dengan negara lain yang telah sukses memberlakukan program sertifikasi khotib seperti Arab Saudi, Malaysia, dan Brunei.

Kata Kunci: Sertifikasi Khotib, Khotib Profesional, dan Organisasi Keagamaan.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abd Munib

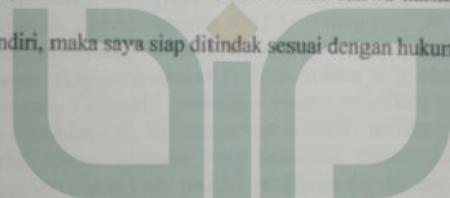
NIM : 19202010005

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 08 juni 2021



Abd Munib, S.Sos.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister
Komunikasi dan Penyiaran Islam,
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul **Diskursus Sertifikasi Dai: Pandangan Organisasi Keagamaan di Pamekasan.**

Oleh

Nama	:	Abd Munib, S.Sos
NIM	:	19202010005
Fakultas	:	Dakwah dan Komunikasi
Jerjang	:	Magister (S2)
Program Studi	:	Komunikasi dan Penyiaran Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Sosial.

Wassalamu'alaikum. wr. wb.

Yogyakarta, 8 Juni 2021
Pembimbing

Dr. H. M. Kholili, M.Si.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1159/Un.02/DD/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : Diskursus Sertifikasi Khotib: Pandangan Organisasi Keagamaan di Pamekasan

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABD. MUNIB
Nomor Induk Mahasiswa : 19202010005
Telah diujikan pada : Senin, 26 Juli 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I
Dr. H. M. Kholili, M.Si.
SIGNED
Valid ID: 6102af2817c0c

Pengaji II
Dr. H. Ahmad Rita'i, M.Phil.
SIGNED
Valid ID: 61035efdf5cf23

Pengaji III
Drs. Lathiful Khuluz, M.A., BSW., Ph.D.
SIGNED
Valid ID: 610076f11af88

Yogyakarta, 26 Juli 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED
Valid ID: 61036598d7037

MOTO

*Setiap yang diperinta, Rasul laksanakan semampunya dan apa yang dilarang
Rasul, tinggalkan sepenuhnya. (QS. Al-Hasyr: 7).*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah ala kulli hal mengiringi rampungnya tesis ini. *Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallahu alaihi wasallam*, semoga senantiasa kita mendapat syafaatnya khusus di hari kebangkitan, *amin ya mujibassailin*. Kupersembahkan karya ini kepada orang tuaku: Bapak Abdul Mannan Dahlan dan Ibu Sayyidah Sahama binti Ma'un. Semoga beliau berdua serta seluruh sesepuh dan anak-anaknya juga semua keluarganya senantiasa mendapat *magfirah*, *rahmat*, dan *ridla* Allah *subhanahu wataala*, *amin ya mujibassailin*.

Karya ini juga kupersembahkan kepada tujuh saudaraku: Hasibah, Moh. Thohir, S.Pd.I., Ahmad Mahfudz, S.Pd.I., Abdul Wafi, S.Pd.I., Muthiataul Jannah, S.Th.I., dan Fathul Qoraib, SE. Semoga mereka dilimpahi keberkahan dan diliputi kasih sayang Allah *subhanahu wataala*, amin. Kupersembahkan pula karya ilmiah ini kepada handaitaulan yang telah mendukung dan membantu saya secara moral khususnya seluruh sepupuku, semoga mereka senantiasa selalu dalam ridla Allah dan mendapat syafaat Rasulillah *sallahu alaihi wasallam*, *amin ya mujibassailin*.

Besar harapan saya, semoga karya ini dapat memberi sumbangan konseptual bagi para pengkaji dakwah di Indonesia. Dengan demikian, karya ini juga saya persembahkan pada Bangsa Indonesia, semoga senantiasa menjadi negeri yang *baldatun thayyibatun warabbun gafur*, *amin ya mujibassailin..*

Penulis, 27 Juli 2021

Abd Munib, S.Sos.

Kata Pengantar

Alhamdulillahi rabbil alamin, senantiasa menjadi kalimat yang dipanjatkan penulis sebagai pujian kepada *Dzat* yang Maha Pengasih tanpa tebang pilih, yang Maha Penyayang tanpa batas petang dan seiang yakni, Allah *azza wajalla*. Atas *Qudrat* dan *Iradat*-Nya, penulis bisa merampungkan banyak hal termasuk dalam penyelesaian tugas akhir ini. *Ashshalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah*, terus-menerus penulis lantunkan dengan harapan semoga kita bisa menjadi bagian dari umat Islam yang mendapat syafaatnya di hari kebangkitan.

Karya ilmiah ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis. Besar harapan penulis, semoga karya ilmiah ini bermanfaat bukan saja secara nilai prosedural melainkan juga secara nilai moral. Secara prosedural, karya ini diajukan pada institusi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta sebagai syarat bagi penulis guna memenuhi gelar Magister. Secara moral, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap khazanah dakwah Islam di Indonesia.

Semangat menciptakan khotib-khotib profesional melalui wacana sertifikasi khotib tentu tidak diharapkan menjadi sumbu penyulut bagi masyarakat yang awalnya taat dan mau mendengarkan perkataan ulama lalu mengubah ketiaatan menjadi kecualasan oleh karena adanya kepentingan politis yang diselipkan melalui wacana tersebut. Dengan demikian, khotib sebagai juru dakwah tidak menelan pil pahit dari mencuatnya wacana program sertifikasi khotib yang telah diwacanakan Kementerian

Agama Republik Indonesia. Guna mengantisipasi semua itu maka penulis memandang penting bahwa sertifikasi khotib menjadi wacana penting yang layak dan menarik untuk disikapi secara akademis, yakni dengan mengedepankan logika berpikir terstruktur. Oleh karena itu, penelitian ini fokus menyajikan tentang pandangan dan perdebatan organisasi keagamaan di Kota Pamekasan.

Tentu, dalam peroses penyelesaian karya ini tidak lepas dari Bapak Dr. HM. Kholili,M.Si., sebagai dosen pembimbing tesis (DPT) saya sekaligus penguji sebagai I, Bapak Dr. H. Akhmad Rifa'I, M.Phil., selaku dosen pembimbing akademik (DPA) saya sekaligus penguji II, juga arahan dari Bpk. Drs. Lathiful Khuluq, MA., BSW., Ph.D., selaku penguji III dalam karya ilmiah ini, semoga para Bapak penguji senantiasa mendapat rahmat Allah dan syafaat Rasulullah, serta dukungan dan arahan dari segenap civitas akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tanpa mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan *jazakumullah ahsanal jaza'* kepada segenap civitas institusi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang pada hakikatnya telah turut berkontribusi atas rampungnya penelitian ilmiah ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Kajian Teori	17
1. Eksplorasi Sertifikasi Khotib	17
a. Praktik Relasi Kuasa-Pengetahuan Foucauldian dalam diskursus Sertifikasi Khotib.....	18
b. Kohesi Wacana Sertifikasi Khotib dengan Pedoman Dakwah MUI	23
c. Sertifikasi Khotib Formulasi Profesionalitas Khotib.....	41
2. Teori Diskursus	56
3. Teori Narasi	61
4. Teori <i>Groupthink</i>	63
5. Teori Kontrol Sosial	66

F. Metode Penelitian	68
G. Sistematika Penulisan	73
H. Kerangka Penelitian	75
I. Operasionalisasi Konsep Penelitian	76
BAB II: RELIGIUSITAS DAN NASIONALISME MASYARAKAT	
DI PAMEKASAN	80
A. Religiusitas Masyarakat di Pamekasan	84
B. Nasionalisme Masyarakat di Pamekasan	95
BAB III: PANDANGAN DAN PERDEBATAN ORGANISASI	
KEAGAMAAN DI PEMEKASAN TENTANG DISKURSUS	
SERTIFIKASI KHOTIB	108
A. Narasi Keagamaan dan Kebangsaan SI, Muhammadiyah, dan NU di Pamekasan Tentang Diskursus Sertifikasi Khotib	112
1. Narasi Keagamaan SI, Muhammadiyah, dan NU di Pamekasan Tentang Diskursus Sertifikasi Khotib.....	113
a. Narasi Keagamaan Sarekat Islam (SI) Tentang Diskursus Sertifikasi Khotib	114
b. Narasi Keagamaan Muhammadiyah Tentang Diskursus Sertifikasi Khotib	119
c. Narasi Keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) Tentang Diskursus Sertifikasi Khotib	125
2. Narasi Kebangsaan SI, Muhammadiyah, dan NU di Pamekasan Tentang Diskursus Sertifikasi Khotib.....	129

a.	Narasi Kebagsaan Sarekat Islam (SI) Tentang Diskursus Sertifikasi Khotib	130
b.	Narasi Kebangsaan Muhammadiyah Tentang Diskursus Sertifikasi Khotib	133
c.	Narasi Kebangsaan Nahdltul Ulama (NU) Tentang Diskursus Sertifikasi Khotib	136
B.	Logika Berpikir SI, Muhammadiyah, dan NU di Pamekasan	
	Tentang Diskursus Sertifikasi Khotib	139
1.	Poros Pandangan SI, Muhammadiyah, dan NU di Pamekasan Terkait Diskursus Sertifikasi Khotib	141
2.	Campuran Pandangan SI, Muhammadiyah, dan NU di Pamekasan Terkait Diskursus Sertifikasi Khotib	144
3.	Kesamaan Pandangan SI, Muhammadiyah, dan NU di Pamekasan Terkait Diskursus Sertifikasi Khotib	146
BAB IV: PENUTUP	152
A.	Kesimpulan.....	152
B.	Saran	157
DAFTAR PUSTAKA	159

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) mempopulerkan wacana program sertifikasi khotib sejak tahun 2017. Pada saat itu,, Kemenag RI masih dipimpin oleh Lukman Hakim Saifuddin dengan masa jabatan 2014-2019. Sejak Oktober 2019 sampai dengan Desember 2020, Kemenag RI diganti Fachrul Razi yang kemudian juga mendorong perwujudan wacana program sertifikasi khotib. Bahkan, Menteri Agama periode 2020-2024, Yaqut Cholil Qoumas menunjukkan kesepakatan pada program sertifikasi khotib tersebut karena dianggap sangat membantu khususnya dalam merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sertifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Ilmiah (KBBI) diartikan sebagai surat keterangan (SK) dari lembaga-lembaga yang memiliki otoritas untuk kemudian menunjukkan bahwa individu yang memiliki surat tersebut dikategorikan sebagai pribadi yang layak menjalankan tugasnya sesuai dengan profesi yang ditekuni. Pemberian SK untuk menunjukkan adanya keprofesionalan sudah diperlakukan dalam berbagai bidang profesi salah satunya profesi Penyuluhan Agama. Prosesi pengangkatan

penyuluhan memiliki syarat tersendiri sehingga formulasi kualifikasinya cukup mudah dilaksanakan.¹

Mengacu pada SK Penuluhan Agama maka, maka sertifikasi khotib adalah upaya untuk menciptakan penceramah yang kompeten, profesional, berkualitas serta memiliki kualifikasi pemahaman keagamaan sehingga betul-betul mempunyai dalam menjalankan praktik-praktik profesinya yakni, menyampaikan pesan-pesan Agama Islam. Ide sertifikasi khotib mengemuka karena dilatarbelakangi oleh sejumlah khotbah keagamaan yang ditengarai justru tidak memberikan kesejukan, utamanya ketika menjelang hajatan kontestasi politik. Didukung dengan kemajuan teknologi seperti kehadiran media sosial *youtube*, *Instagram*, dan lainnya yang turut serta memunculkan khotib-khotib baru sehingga dinilai semakin terlalu bebas dalam mensyiaran pesan-pesan keagamaan.

Munculnya khotib-khotib baru tentu memang meniupkan angin segar bagi pemahaman keagamaan masyarakat akan tetapi sekaligus memicu dan menghadirkan krikil penghalang sebab pesan keagamaan berpotensi disyiarkan dengan pemahaman

¹ Adapun syarat yang harus dipenuhi; memiliki kompetensi penyuluhan, memiliki pengalaman minimal dua tahun di bidang penyuluhan, bukan pengurus partai, memiliki rekomendasi dari pokja/kabupaten/kota, kualifikasi pendidikan S1, serta telah dikenal kiprah, pengalaman, juga pengabdianya dalam bidang dakwah. Standar kompetensi penyuluhan Agama didasarkan pada; kompetensi ilmu keagamaan (meliputi mampu membaca dan memahami Alquran, Hadist, Fiqih, dan memahami sejarah Nabi Muhammad SAW.); kompetensi kompetensi (mampu menyampaikan ceramah Agama/Khotbah, memberikan konsultasi Agama, dan aktif dalam organisasi keagamaan/kemasyarakatan); kompetensi moral (berakhlaq mulia dan tidak terlibat dalam masalah hukum). Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ, III/432 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluhan Agama Non-PNS Bab IV dan Bab V.

bersifat ekstremis.² Diskursus sertifikasi khotib sangat erat berkaitan dengan menyeruaknya pretensi-pretensi bahwa paham-paham radikalisme yang diadopsi serta dianut oleh masyarakat berkelindan dengan pemahaman keagamaan yang disampaikan oleh juru dakwah melalui mimbar-mimbar ceramah. Dengan demikian, sejak awal munculnya wacana sertifikasi khotib tercatat sebagai gagasan yang *debatebal*, simpang-siur, dan bahkan menuai kontroversi tersendiri di kalangan publik di Indonesia. Ada yang mendukung atas program sertifikasi dengan membangun wacana agar pesan-pesan keagamaan di sampaikan oleh penceramah-penceramah yang memang memiliki kompetensi keagamaan.

Namun kompetensi keagamaan saja tidak cukup sehingga harus diimbangi dengan pengetahuan tentang metode dan pemahaman kebangsaan. Ada pula yang menolak terhadap program sertifikasi khotib dengan alasan masyarakat sudah pandai dan cerdas dalam menentukan penceramah yang memang sudah kompeten. Alasan lain terhadap penolakan sertifikasi khotib dikhawatirkan Negara terlalu ikut campur dalam hal keagamaan masyarakat sebab melalui sertifikasi khotib, Negara dapat mengontrol konten-konten keagamaan yang akan disampaikan oleh penceramah. Kalau ide sertifikasi khotib yang dimaksud Kemenag RI adalah semacam penghormatan berbentuk sertifikat kepada para khotib yang memenuhi kualifikasi

² Hal ini berpotensi mimbar-mimbar keagamaan dialih-fungsikan menjadi ruang dan tempat menyebarkan paham radikal sehingga jamaah yang datang justru bukan mendapatkan ketiduhan rohani melainkan keriuhan. Padahal, mestinya dakwah Islam dipraktikkan dengan metode yang tidak ekstrim, anarkis, serta tidak menodai Islam yang *rahmatan lil ‘alam*. Inilah kemudian pentingnya pemerintah membina lebih dahulu para pencaramah yang hendak berdakwah kepada masyarakat bukan memeberi sanksi apalagi mengkriminalisasi ulama. Saipul Annur, “Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Ulama di Kota Palembang,” Medina-Te Vol. 18 No. 1 (Juni 2018).

selaras dengan keinginan pemerintah dan sekaligus hanya sebagai pengenal bahwa yang bersangkutan dinilai layak untuk menyiarkan khotbah maka tampak akan sulit untuk dilaksanakan. Gagasan sertifikasi khotib dengan formulasi semacam itu berpotensi dipahami bahwa pemerintah memiliki kecondongan politis bahkan dapat dianggap sebagai alat kontrol alias pembatas pemerintah terhadap para khotib. Kesulitan lain terletak pada prihal teknis sertifikasi khotib yang akan diformulasikan pemerintah lebih-lebih karena adanya resistensi atau ketahanan dari hubungan para khotib dengan masyarakat yang berlangsung cukup baik selama ini. Apabila gagasan sertifikasi khotib sejak awal dipopulerkan ke dalam makna kompetensi khatib tanpa mengesankan dan menekankan pembatasan juga pemaksaan, serta sertifikasi khotib dimaksudkan sebagai pengajuan izin untuk mengundang para penceramah mungkin bukan problem dan tidak jadi soal sehingga kemudian praktiknya bersifat suka rela.³

Dikutip dari Fahrurrozi dalam merespon wacana sertifikasi khotib,⁴ Zainut Tauhid Sa'adi berargumentasi sekurang-kurangnya terdapat tiga syarat mutlak terkait wacana tersebut. *Pertama*, program sertifikasi khatib senantiasa harus bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi khatib, baik dari sisi kemampuan materi dakwah maupun metodologi dakwah. Zainut Tauhid menyadari bahwa kondisi masyarakat Indonesia tengah mengalami pergeseran nilai moral seiring pesatnya perkembangan kecanggihan mesin pencari berbasis online. Kondisi

³ Bahri, S. (2017 Februari). Tanggapi wacana sertifikasi khatib, MUI ajukan tiga syarat. Diakses dari <https://www.dakwatuna.com/2017/02/06/85428/tanggapi-wacana-sertifikasi-khatib-mui-ajukan-tiga-syarat/#axzz5RG9drBHz>.

⁴ Fahrurrozi, "Sertifikasi atau Standarisasi Khatib? Respon Para Dai di Kota Mataram," Jurnal Komunikasi Vol. 08, No. 01 (Juni 2018).

jenis ini secara otomatis mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk terus beradaptasi jika ingin tetap eksis, tanpa terkecuali seorang khotib terlebih aktifitas para khotib memang tidak bisa dipisahkan dengan aktifitas keagamaan masyarakat. Oleh sebab itu, mendorong peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan kualitas di bidang penguasaan terhadap materi dan metodologi dakwah merupakan langkah mutlak yang diperlukan oleh seorang khotib dengan harapan pesan pesan keagamaan dapat tersyiar secara bijaksana selaras dengan kaidah *Alīmun bi zamā nihî wa ‘alīmun bi mujtamâ’ihî* (khotib mengerti kondisi dan situasi faktual yang dihadapi masyarakat alias menyesuaikan konteks keagamaan sesuai dengan keperluan masyarakat).

Kedua, program sertifikasi khatib bersifat *voluntary* atau sukarela bukan *mandatory* alias kewajiban. Maksudnya, gagasan sertifikasi khatib apabila hendak praktikkan harus bersifat sukarela dan bukan kewajiban yang memiliki efek hukum hukum. Sebab, kegiatan dakwah pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban setiap manusia yang sejak awal sudah diperintah bahkan dianjurkan Agama. Apabila sertifikasi khatib menjadi program yang diwajibkan dengan konsekuensi hukum maka bisa dipastikan sulit untuk diperlakukan sebab yang akan muncul adalah kekhawatiran akan adanya intervensi atau campur tangan penguasa yang dapat menghadirkan kontra produktif tersendiri. *Ketiga*, yang paling idela seharusnya penyelenggara program sertifikasi khotib dijalankan oleh ormas Islam atau masyarakat bukan pemerintah. Pada konteks ini, pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator, mendorong partisipasi masyarakat agar berlomba-lomba bersedia menjadi

kader-kader penceramah yang mumpuni, setidaknya dari aspek materi juga metodologi dakwah.

Guna mempraktikkan wacana program sertifikasi khotib dan agar tetap terawat kebijaksanaan dari wacana tersebut maka sepantasnya wacana sertifikasi khotib dipraktikkan oleh organisasi keagamaan tentu dengan rambu-rambu yang jelas dari lembaga keagamaan milik negara seperti Kemenag RI dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Artinya, Kemenag RI dan MUI sebagai lembaga yang berafiliasi dengan negara cukup meskenariokan pedoman umum yang kemudian memberi wewenang kepada masing-masing organisasi keagamaan untuk menterjemah dan mensukseskannya.⁵ Apabila wacana sertifikasi khotib harus dilakukan oleh Kemenag RI atau MUI maka pelaksanaanya tetap tanpa tendensi memaksa sekaligus menyediakan lembaga yang kredibel dan berintegritas serta melibatkan ormas. Pemerintah selanjutnya terus-menerus mengedukasi pengurus masjid agar lebih

⁵ Sebagai lembaga keagamaan tertinggi dan jadi panutan dari berbagai ormas Islam di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga harus mampu memberikan contoh dan teladan dalam manifestasi karakter dan sikap organisasi terutama menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. MUI harus menguatkan perannya menjaga Negara dari upaya-upaya yang mencederai kesepakatan kesepakatan nasional seluruh bangsa. Juga menjaga umat dari akidah yang menyimpang dari mualalah yang tidak sesuai serta dari mengkonsumsi yang tidak halal. Salah satunya dengan tetap berkomitmen menjaga implementasi *islam wasithiyah* (moderat) melalui pembenahan dan perbaikan berkelanjutan dalam lembaga MUI. Pembenahan penting agar MUI dapat memberi pelayanan prima kepada masyarakat dan pemerintah serta terus mendukung dan mengawal pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Apalagi pada hakikatnya, ulama adalah mereka yang melihat umat dengan mata kasih saying tanpa mau menuduh dan menghakimi tanpa tabayun atau klarifikasi. Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) sebagai *leading sector* menempuh jalan bersinergi dengan MUI dan ormas keagaman lainnya dalam menguatkan moderasi beragama di Indonesia. Mederasi penting dikembangkan karena diyakini sebagai kunci menciptakan toleransi dan kerukunan. Sementara kerukunan merupakan modal utama pembangunan. Moderasi beragama ditankotib dengan munculnya rasa cinta tanah air, toleransi tinggi, antikekerasan, serta akomodatif terhadap budaya lokal. Kompas, *MUI ikut Menjaga Kesepakatan Nasional*, (28 November 2020).

memilih khotib-khotib bersertifikat.⁶ Jangan sampai wacana sertifikasi khotib justru berfungsi sebagai sumbu penyulut bagi masyarakat yang awalnya taat dan mau mendengarkan perkataan ulama lalu mengubah ketaatan menjadi kecemasan oleh karena adanya kepentingan politis yang diselipkan melalui wacana tersebut. Di sinilah pemerintah harus memperhatikan dan mempertimbangkan bagaimana pandangan dan perdebatan di kalangan organisasi keagamaan. Dengan harapan, citra para juru dakwah tetap terjaga serta tidak menelan pil pahit dari program sertifikasi khotib yang telah diwacanakan Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada tataran inilah, sertifikasi khotib menjadi wacana menarik yang layak sekaligus penting untuk disikapi juga dikaji secara akademis yakni, dengan mengedepankan logika berpikir terstruktur.

Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi terkait pandangan dan perdebatan organisasi keagamaan di Kota Pamekasan Madura dalam menyikapi wacana program sertifikasi khotib yang diwacanakan oleh Kemenag RI ini. Adapun organisasi keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini terdapat tiga organisasi keagamaan besar yang ada di Kota Pamekasan, Jawa Timur yakni, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU). Tiga organisasi keagamaan tersebut selain memiliki jumlah anggota yang tidak sedikit sekaligus memiliki peran dan kontribusi yang cukup signifikan khususnya gerakan-gerakan keagamaan yang

⁶ A. Zubaidi, (2017, Maret), *Sertifikasi Kompetensi Khatib*, (Gatra, Maret 2017).

telah dipersembahkan masing ormas Islam tersebut di Kota Pamekasan yang berjuluk Kota Gerbang Salam.

B. Rumusan Masalah

Berasakan uraian latar belakang di atas maka penelitian ini untuk mengeksplorasi pandangan dan mengurai perdebatan yang menjadi landasan organisasi keagamaan dalam hal ini Sarekat Islam (SI), Muhammadiyah, dan Nahdalatul Ulama (NU) cabang Pamekasan tentang sertifikasi khotib yang diwacanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). Oleh karena itu, penelitian ini diumuskan kedalam dua bentuk pertanyaan besar penelitian sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pandangan organisasi keagamaan di Pamekasan tentang sertifikasi khotib?
2. Mengapa terjadi perdebatan sertifikasi khotib di kalangan organisasi keagamaan tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan atas dasar beberapa tujuan. *Pertama*, bertujuan untuk mengeksplorasi dan menginterpretasi pandangan-pandangan organisasi keagamaan yakni, Sarekat Islam (SI), Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU) di Pamekasan tentang diskursus sertifikasi khotib. yang diwacanakan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenga RI). *Kedua*, mengeksplorasi menginterpretasi perdebatan-perdebatan tentang wacana program sertifikasi khotib tersebut di kalangan SI, Muhammadiyah, dan NU di Pamekasan.

Hasil penelitian ini didasarkan pada beberapa kegunaan yang menjadi harapan peneliti. *Pertama*, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan kepada pihak Kemenag RI dalam menggulirkan kebijakan mengenai fenomena keagamaan di Indoensia yang multietno-religius sekaligus multigolongan. *Kedua*, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi Kemenag RI dalam melaksankan kebijakan dan mengevaluasi program sertifikasi khotib. *Ketiga* riset ini diharapkan bisa menjadi sumbangan konseptual di bidang kajian dakwah.

D. Kajian Pustaka

Sebagai wacana baru yakni, pada 2017 cukup jarang penelitian khususnya tesis yang mengeksplorasi tentang wacana sertifikasi khotib sebagai obyek penelitian ilmiah. Dengan demikian, kajian pustaka yang dirujuk dalam penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian dalam bentuk jurnal berikut:

1. Saipul Annur, “Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Ulama di Kota Palembang,” Medina-Te Vol. 18 No. 1 (Juni 2018).

Penelitian ini menyajikan soal respon masyarakat di Kota Palembang terkait sertifikasi ulama dengan hasil temuan bahwa upaya pemerintah untuk mensertifikasikan ulama dengan maksud membina ulama bukan suatu persoalan harapannya agar para ulama mensyiarkan Islam dengan pesan penuh damai kepada kelompok lain yang bahkan beragama berbeda atau pada kelompok yang memiliki paham tidak sama. Walaupun pada dasarnya aktivitas dakwah adalah kewajiban setiap manusia yang sudah dianjurkan Agama tetapi, faktanya terdapat sejumlah penceramah yang dengan aktivitas dakwah cenderung kasar dalam berbicara sedangkan Islam menganjurkan berbicara hendaknya komunikasi dipraktikkan dengan baik, tutur kata lembut selaras dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sebuah upaya yang bijak, pemerintah perlu mengadakan pembinaan terlebih dahulu terhadap para penceramah yang hendak mensyiarkan pesan-pesan kepada masyarakat. Dalam karya ilmiah ini, peneliti menyadari bahwa pandangan masyarakat

terhadap para ulama telah mengalami pergeseran sehingga masyarakat yang tadi hormat dan mau mendengarkan perkataan ulama belakangan telah berubah. Penelitian ini menunjukkan dukungan terhadap pemerintah atas terlaksananya wacana sertifikasi khatib guna mengembalikan ulang citra ulama sudah terkikis. Tetapi, penelitian ini menekankan bahwa program sertifikasi harus bersifat sukarela bukan keharusan yang memiliki efek hukum.

2. Fahrurrozi, "Sertifikasi atau Standarisasi Khatib? Respon Para Dai di Kota Mataram," Jurnal Komunikasi Vol. 08, No. 01 (Juni 2018).

Karya ilmiah ini menyajikan prihal respon terhadap wacana khatib salat Jumat dengan menjadi para khotib di Kota Mataram sebagai subyek penelitian. Kuantitatif sebagai metodologi yang digunakan dalam penelitian ilmiah ini dengan hasil temuan: *Pertama*, Sertifikasi belum dan bukan sebuah program yang penting pada dekade ini sehingga para khatib tetap dan harus diberi ruang keleluasaan dalam mensyiaran materi khubahnya selaras dengan anjuran Agama Islam. *Kedua*, mayoritas khatib di Kota Mataram merespon sertifikasi atau standarisasi khatib dengan menganggap langkah tersebut sebagai sesuatu yang kurang bijak dan kurang tepat sebab khatib adalah tugas informal umat Islam dalam menyebarkan pesan Agama melalui mimbar jumat. Oleh karena itu, program sertifikasi khatib dinilai memiliki dampak negatif terhadap keberlangsungan ibadah salat Jumat. Kondisi ini bisa

dilihat apabila suatu ketika khatib yang nyata telah memiliki sertifikat berhalangan menjadi khatib maka ibadah Jumat ikut terkendala. Secara tegas penilitian ini mengemukakan penolakan terhadap klaim bahwa paham radikalisme dilatarbelakangi oleh materi khutbah para yang disiarkan khatib karena klaim tersebut sejauh ini tidak lebih dari tuduhan-tuduhan tak berdasar sebab pada kenyataannya meskipun ada gerakan radikalasi di tengah-tengah Kotam Mataram itu bukan akibat dari materi khutbah Jumat.

Kedua karya ilmiah tersebut sama-sama menyajikan tentang respon yakni, *Pertama*, Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Ulama di Kota Palembang. *Kedua*, Respon Para Khotib di Kota Mataram. Adapun penelitian ilmiah ini secara spesifik untuk menyajikan pandangan dan perdebatan di kalangan organisasi keagamaan di Pamekasan tentang wacana sertifikasi khotib. Meskipun ada kesamaan antara khatib Jumat dengan khotib yakni, sama-sama sebagai juru dakwah pada kenyataannya seorang khotib tanpa label seperti salat Jumat dan salat *Ied* cenderung memiliki tugas luas didukung jamaahnya yang lebih beragam dengan latar belakang yang sangat majemuk. Poin penting yang menjadi pembeda dengan penelitian yang sudah ada menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya secara khusus membahas tentang respon sedangkan penelitian ini untuk menyajikan serta menunjukkan pandangan dan perdebatan organisasi keagamaan sehingga pandangan dan

perdebatan yang disajikan bukan saja mewakili individu melainkan mewakili kelompok organisasi keagamaan.

3. S. Muhtadi, “Komunikasi Lintas Agama: Mencari Solusi Konflik Agama,” International Conference on Islam in Malay World IX, Krabi, Thailand. Conference Proceeding ICONIMAD 2019.

Penelitian ini mengemukakan keragaman atau pluralitas membutuhkan pengelolaan model komunikasi yang berpotensi besar diterima oleh tiap-tiap pihak. Kelengahan dalam pengelolaan sosial potensi keragaman ini dapat menimbulkan ketidakharmonian bahkan memicu konflik termasuk konflik agama. Peneliti juga menegaskan bahwa beberapa kasus yang terjadi, khususnya di Indonesia, ketegangan seringkali bersumber dari rendahnya kualitas komunikasi antarpemeluk agama yang berbeda. Kalaupun ada upaya formal dalam bentuk dialog antar umat beragama, dialog-dialog tersebut cenderung mengabaikan faktor substansi yakni, dialog cenderung monoton dan satu arah sehingga tidak ditemukan solusi penyelesaian konflik. Maka dibutuhkan model komunikasi yang dapat menjembatani ketegangan agar meredakan konflik sejak dini. Karya ini menyodorkan satu solusi komunikasi yakni, melalui pendekatan komunikasi antarbudaya (*cross cultural communication*) dengan maksud mengedepankan ketulusan menghargai perbedaan. Agama bukan semata-mata dapat menjadi media dalam berkomunikasi, melainkan menjadi spirit orang dalam berkomunikasi.

Kaum Agamawan harus menjiwai setiap pesan Agama yang disampaikannya. Tulus dan ikhlas tanpa pretensi apapun adalah bagian dari spirit Agama. Akhirnya, perbedaan agama yang dianut oleh para aktor komunikasi tidak menghalangi rasa empati guna mengekspresikan kesadaran solidaritas melalui peningkatkan kompetensi komunikasi yang plural.

4. HM. Kholili, “Dakwah Kultural dan Dakwah yang Ramah: Rancangan Komunikasi Untuk Dakwah,” Annual Conference for Muslim Scholars Kopertais Wilayah IV Surabaya. Proceeding ANCOMS 2017.

Karya ilmiah ini dalam mewujudkan dakwah yang ramah mengupayakan pengembangan kompetensi khotib dengan melakukan prioritas langkah-langkah seperti mengembangkan kemampuan khotib dalam memahami sosial budaya masyarakatnya dengan beradaptasi melalui penyelenggaraan training atau workshop komunikasi antar budaya dan yang sejenis. Langkah lainnya adalah mengembangkan pengetahuan khotib mengenai pesan dakwah dan realitas kebutuhan masyarakat. Karya ilmiah ini menegaskan tentang pentingnya beberapa hal. *Pertama*, kualifikasi untuk para khotib agar dakwah yang disampaikan bisa berjalan dengan humanis, diantaranya kemampuan pengetahuan, kemampuan memahami sosial budaya, kemampuan memahami sosial budaya masyarakat. *Kedua*, kemampuan berkomunikasi seorang khotib berkontribusi 50,6% bagi terjadinya kompetensi seorang khotib dalam melakukan dakwah. *Ketiga*, pengetahuan

tentang pesan dan Jamaah berkontribusi 38,2% bagi terjadinya kompetensi seorang khotib dalam melakukan dakwah. *Keempat*, kemampuan memahami sosial budaya berkontribusi 53,6% bagi terjadinya kompetensi seorang khotib dalam melakukan dakwah. *Kelima*, dalam menentukan kompetensi seorang khotib. Kemampuan berkomunikasi menempatkan pada posisi yang lebih penting (53,6% dan 50,6%) dibanding indikator Pengetahuan tentang Pesan dan jamaah (38,2%). Artinya bahwa betapa seorang khotib harus menjadi orang yang mampu memahami sosial budaya jamaahnya agar dia dapat berkomunikasi menyampaikan pesan dengan baik terhadap jamaahnya.

5. Kholid Novianto dan Sahroni A. Jaswadi, “Gaya Retorika Dai dan Perilaku Memilih Penceramah,” Jurnal Komunikasi Islam Vol 4 No. 1 (Juni 2014).

Karya ilmiah ini berusaha mengungkap kecenderungan jamaah pada kegiatan pengajian al-Istiqomah di Jambangan Surabaya terkait memilih penceramah Agama berdasarkan pada kemampuan retorika yang digunakan khotib. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan sampel 150 jamaah laki-laki dan perempuan melalui teknik penyebaran angket dengan skala likert. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa jamaah pengajian al-Istiqomah Surabaya cenderung memilih penceramah yang menggunakan gaya rekreatif. Kendati demikian, hasil penelitian ini menyatakan bahwa memilih bukan serta-merta berarti senang terhadap segala fitur atau karakteristik yang dimiliki oleh penceramah. Sebagian responden

menyatakan asal pilih terhadap penceramah dan enggan mengamalkan materi yang disampaikan olehnya. Sedangkan lainnya mengaku suka dengan isi ceramah dan giat mengamalkannya. Puncaknya, mengenai sifat responden saat memilih penceramah adalah hanya sekedar memilih saja. Artinya, saat dianalisis lebih lanjut Noviyanto dan Jaswadi menunjukkan bahwa jamaah memilih tidak memiliki pertimbangan lebih lanjut.

Sedangkan tiga penelitian trakhir, meskipun membahas tentang khotib atau penceramah tetapi lebih pada sisi komunikasi penceramah itu sendiri. Dalam temuannya, masing-masing ketiga penelitian menunjukkan betapa gaya komunikasi memiliki pengaruh penting dalam kegiatan dakwah agar pesan-pesan Agama yang lebih mudah diterima oleh para objek dakwah. Adapun karya ilmiah ini bertujuan mengungkap pandangan dan perdebatan organisasi keagamaan di Pamkeasan tentang wacana sertifikasi khotib yang kemudian diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pemerintah dalam mempertimbangkan ataupun wacana program sertifikasi khotib tersebut.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Kajian Teori

Teori merupakan pisau bedah yang digunakan penulis guna mencapai keabsahan penelitian dalam riset ini. Adapun teori yang penulis digunakan penulis antara lain sebagai berikut:

1. Eksplorasi Sertifikasi Khotib

Diskursus sertifikasi khotib tentu tidak muncul secara tiba-tiba kendati untuk mewujudkan pernyataan atau gagasan sertifikasi khotib menjadi sebagai program nyata juga membutuhkan proses dan waktu yang tidak singkat. Sadar atau tidak, di balik setiap ide atau gagasan terdapat pendukung serta yang tidak bisa dielakkan keberadaanya pula adalah penentang gagasan tersebut. Dengan demikian, adanya dukungan tidak serta-merta menunjukkan gagasan tersebut sebagai sesuatu yang paling ideal. Begitu pula dengan mengemukanya penolakan tidak lantas menjadi aral melintang apabila gagasan tersebut memang layak dan patut diperlakukan. Oleh karena itu, dukungan maupun penolakan terhadap suatu gagasan apalagi gagasan yang berkaitan dengan isu yang menghubungkan antara keagamaan dan kebangsaan sangat dibutuhkan keberadaanya untuk kemudian dijadikan sebagai sumbangan khazanah pengetahuan dalam mengevaluasi gagasan-gagasan tersebut khususnya gagasan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) dalam mewujudkan khotib-khotib yang profesional.

Sehingga di era keterbukaan saat ini sertifikasi khotib dinilai oleh sejumlah kalangan sebagai gagasan yang menjadi oase di tengah gurun di mana pesan-pesan

Agama Islam bisa bebas disiarkan bahkan oleh individu-individu yang tidak memiliki kedalaman pemahaman keagamaan. Apalagi, gagasan atau pernyataan sertifikasi bila digandeng dengan suatu profesi dalam sejarahnya telah menjadi sejenis pernyataan untuk menegaskan keahlian, profesionalitas, kredibilitas dalam suatu bidang yang digeluti. Sertifikasi guru atau sertifikasi dosen misalnya yang tidak lain merupakan cara pemerintah untuk menunjukkan kualifikasi yang di bidang yang digeluti guru atau dosen tersebut. Di sisi lain, suatu pernyataan yang disampaikan oleh individu maupun kelompok yang memiliki pengaruh secara sosial maka pernyataan tersebut menurut Foucault otomatis bukan sekadar pernyataan biasa. Dengan demikian, pernyataan tersebut akan berkembang menjadi deskripsi-deskripsi yang didukung oleh relasi pengetahuan dan kekuasaan. Paparan ini menjadi bukti bahwa wacana diproduksi melalui sebuah proses dan mekanisme kuasa.

a. Praktik Relasi Kuasa-Pengetahuan Foucauldian dalam Diskursus Sertifikasi Khotib

Bagi Foucault, wacana diskursus tidak berdiri secara otonom, begitu pula dengan wacana sertifikasi khotib yang telah diwacanakan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) sejak 2017 silam. Lebih dari itu, wacana merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses dan mekanisme kekuasaan. Sebagai contoh relasi kuasa untuk menciptakan ahli bedah maka pasti ada pada proses pendidikannya, ada kukasaan melalui struktur pembentuk dan pemelihara pengetahuan keahlian itu berdasarkan kewenangan struktural yang ada pada para

dosen dan pejabat kampus (speksifikasi jurusan dan program studi) yang memiliki kewenangan, mengatur materi, penataan kurikulum sampai pada pemilihan materi guna mengisi otak calon ahli bedah. Adanya pembinaan atau praktik selanjutnya membentuk para calon ahli sebagai pemegang kuasa ilmu pengetahuan di bidang bedah.

Kontekstualisasinya dengan wacana sertifikasi khotib, pada hakikatnya negara hendak membentuk pengetahuan tentang tipe-tipe khotib yang kredibel melalui kuasa *state apparatusnya* yakni, Kemenag RI sebagai instansi yang memiliki legitimasi dalam memproduksi aturan-aturan atau tipe-tipe tentang penceramah yang profesional. Kekuasaan menurut Foucault bukan sesuatu yang bersifat hierarkis tetapi kekuasaan diartikan sebagai yang menormalisasi atau mendesiplinkan sesuatu selaras bidang kuasa tentang pengetahuan itu sendiri. Kekuasaan sejenis ini menyebar dan beroperasi dalam mekanisme-mekanisme sosial yang ada. Dengan demikian, Foucault dalam Lydia mendefinisikan wacana sebagai bidang dari semua pernyataan, kadangkala sebagai sebuah individualisasi kelompok pernyataan, dan kadang sebagai praktik regulatif yang dilihat dari sejumlah pernyataan.⁷

Selanjutnya, pernyataan tersebut mengemuka menjadi hipotesis pembeda antara yang masuk akal dari analisis yang dilakukannya serta menyusun periodisasi. Tujuannya, pembalikan suatu gerakan yang teratur agar moment rentetan kausalitas

⁷ Lydia Alix Fillingham, *Foucault untuk Pemula*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001), hlm. 100.

sirkular menjadi kacau sehingga gagasan yang bisa jadi paradoks sebelumnya justru menjadi alat. Konstatasi tersebut jelas menjadi bukti bagaimana kebenaran dibentuk dan diproduksi melalui sebuah proses-proses dan mekanisme-mekanisme kuasa. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Foucault dalam Bertens, K. bahwa tidak mungkin pengetahuan itu netral dan murni.⁸

Menciptakan khotib-khotib yang profesional melalui program sertifikasi khotib memang menjadi angin segar bagi tersampaikannya ajaran-ajaran Agama Islam yang *rahmatan lil'alamin* dengan harapan agar ajaran Islam tetap menjadi Agama yang betul-betul memuat penyampaian pesan yang menyejukkan. Maka wajar apabila Kemenag RI dalam mengegolkkan program sertifikasi khotib membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, Saudi Arabia, dan lainnya. Pembandingan tersebut memang menjadi rumus mutlak guna menunjukkan kebenaran untuk mendapat dukungan agar sertifikasi khotib ini diterima sebagai sebuah proses serta mekanisme yang ideal dalam melahirkan khotib-khotib yang betul-betul profesional atau bepengetahuan.

Pengetahuan dan kekuasaan memiliki hubungan timbal-balik. Penyelenggaraan kukuasaan terus-menerus akan menciptakan entitas pengetahuan, begitu pula sebaliknya bahwa penyelenggaraan pengetahuan akan memercikkan efek kuasaan. Sebagaimana ditegaskan Bartens, pengetahuan mengandung kuasa sebagaimana kuasa mengandung pengetahuan yang selanjutnya penjelasan ilmiah

⁸ K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 301.

satu berusaha untuk menguasai dengan menenggelamkan keterangan ilmiah lainnya.⁹

Pada kondisi ini, penceramah-penceramah yang lolos mengikuti program sertifikasi khotib Kemang RI ini akan secara langsung dinggap sebagai penceramah dengan bekal pengetahuan keagamaan mumpuni sekaligus secara bersamaan penceramah berertifikat tersebut memiliki efek kekuasaan.

Kekuasaan bagi Foucault berbeda dengan definisi pada umumnya oleh karena kekuasaan menyebar tanpa bisa dilokalisasi dan meresap ke dalam seluruh jalinan hubungan sosial.¹⁰ Karena itu, kekuasaan menurut Foucault bukan sebuah kepemilikan melainkan praktik untuk mendisiplinkan. Konsep ini menyodorkan konsekuensi bahwa setiap kekuasaan disusun, dimapangkan, dan diwujudkan lewat pengetahuan dan wacana tertentu.¹¹ Pengetahuan beroperasi secara strategis berdasarkan kepentingan tertentu dengan cara mendistribusikan wacana tertentu kepada publik sekaligus membawa beragama ideologi yang pada akhirnya bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat yang menjadi objek dari wacana tersebut.

⁹ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks di Media*, (Jakarta: LKIS, 2003), hlm. 65.

¹⁰ Pada umumnya, kekuasaan dipahami dan dibicarakan sebagai daya atau pengaruh yang dimiliki untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain sehingga dalam pandangan ini kekuasaan cenderung dimaknai represif bahkan kadang cenderung operatif, dominasi antara subjek dan objek dalam mempertahankan kekuasaan sebagaimana kuasa Negara pada masyarakatnya. Pengertian semacam ini banyak digunakan oleh para ahli sejarah, politik, dan sosial. Haryatmoko, “Kekuasaan Melahirkan Anti Kekuasaan,” *Basis*, Volume 1 No. 2 Januari 2002.

¹¹ Foucault sendiri menyatakan bahwa kemapanan atau kebenaran yang dimaksud bukan berasal dari langit dan juga bukan kebenaran abstrak. Kebenaran di sini diproduksi kerena setiap kekuasaan memproduksi kebenaran sendiri melalui khayal yang digiring untuk mengikuti kebenaran yang telah ditetapkan tersebut. Di sini, kekuasaan selalu berpretensi menghasilkan kebenaran rezim tertentu yang disebarluaskan melalui wacana yang diproduksi dan dibentuk oleh kekuasaan. Aminah Bahasoan dan Amir Faisal Kotarumalos, “Praktek Relasi Wacana dan Kuasa Foucauldian dalam Relasi Multi Profesi di Indonesia,” *Populis*, Volume 8 No. 1 Maret 2014.

Fenomena penceramah Agama di Tanah Air saat ini memang kerap membingungkan. Bahwa ada banyak penceramah yang menyampaikan ajaran Islam tentang kesederhanaan tetapi justru penceramah tersebut tampil menjadi bintang iklan barang mewah di layar-layar televisi. Ada pula penceramah yang yang menyampaikan tentang kesantunan dalam berkata-kata tetapi prilaku yang ditampilkan justru mengangkangi pesan-pesan Agama yang disampaikannya sendiri. Ada pula individu yang hanya bermodalkan atribut-atribut keagamaan lalu kemudian tampil menyampaikan pesan-pesan Ayat Suci dengan pemahaman yang tidak utuh. Ujaran kebencian di mimbar ceramah, munculnya khotib yang hanya bermodalkan popularitas (selebriti), baground keagamaan khotib-khotib baru yang tidak jelas, munculnya khotib yang mempertentangkan Pancasila dengan Agama, BIN 2018 mengorbitkan 20 khotib radikal kian memicu kontradiksi tersendiri.

Apabila fenomena tersebut dibiarkan berlangsung terus-menerus maka berpotensi menimbulkan kondisi keberagamaan yang sarat dengan kontradiksi-kontradiksi sehingga kontradiksi keberagamaan tersebut beranak-pianak melahirkan pertengangan-pertengangan baru. Guna memecah kebuntuan kontradiksi-kontradiksi ini maka diperlukan titik-titik yang bisa dijadikan tempat untuk mengelola kontradiksi tersebut. Tentu, titik-titik tersebut harus merujuk pada koherensi-koherensi (hubungan yang logis, kosisten, dan teratur).¹² Di sinilah kemudian,

¹² Michel Foucault, *Arkeologi Pengetahuan*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2012), hlm. 268-269.

Kemenag RI merumuskan koherensi dalam mencegah kontradiksi keberagamaan ini melalui ide atau wacana sertifikasi khotib.

Kekuasaan berkaitan dengan praktik. Praktik yang dimaksud di sini adalah penciptaan normalisasi melalui aturan-aturan. Aturan yang dimaksud di sini tidak diwujudkan dengan cara-cara represif. Aturan ini telah dirumuskan dalam Instruksi Menteri Agama RI No.5/19971 tentang Bimbingan Pelaksanaan Dakwah Khotbah dan Ceramah Agama agar benar-benar dilaksanakan sesuai dengan hakikat dakwah agama dengan bertujuan: *Pertama*, menyampaikan ajaran agama kepada masyarakat. *Kedua*, menyampaikan ajaran agama kepada masyarakat. *Ketiga*, mengajak dan menyerukan ummat beragama pada jalan yang benar sesuai dengan ajaran agamanya masing. *Keempat*, meningkatkan ketakwaan ummat beragama terhadap Tuhan Yang Maha Esa. *Kelima*, meningkatkan penghayatan dan pengalaman ajaran agama masing-masing dan sebagai warga negara yang berdasarkan Pancasila agar selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila. *Keenam*, menciptakan kebahagiaan hidup lahir batin di dunia dan akhirat dengan amal perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai orang-seorang, maupun sebagai anggota masyarakat.

b. Kohesi Wacana Sertifikasi Khotib dengan Pedoman Dakwah MUI

Guna meningkatkan kualitas penceramah atau khotib maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun yang sama, yakni pada tahun 2017 MUI mengeluarkan pedoman dakwah. Artinya, menciptakan khotib profesional melalui sertifikasi yang dicanangkan oleh Kemenag RI menunjukkan adanya saling keterkaitan dengan MUI

melalui pedoman dakwah yang telah diterbitkan MUI itu sendiri. Apalagi kedua lembaga keagamaan tersebut memiliki tanggung-jawab yang besar terhadap fenomena keagamaan yang terjadi Tanah Air ini. Maka sesuatu yang wajar apabila kedua lembaga keagamaan yang sekaligus lembaga negara tersebut bekerja sama, bahu-membahu untuk membuat formulasi penceramah yang ideal agar tujuan dakwah selaras dengan misi kerasulan. Singkat kata, maksud dari keterkaitan atau kohesi pedoman dakwah MUI dengan wacana sertifikasi khotib oleh Kemenag RI bagian dari kepedulian lembaga negara yang bertujuan untuk mencetak khotib yang mampu menyampaikan ajaran Islam yang santun, moderat, dan menyenangkan.

Bentuk keseriusan MUI terkait persetujuannya terhadap wacana kebijakan Menteri Agama RI dalam upaya sertifikasi khotib untuk meningkatkan kualitas mutu khotib agar tidak semua orang bisa mengaku dirinya sebagai khotib maka Cholil Nafis melalui laman akun resmi Instagramnya yakni, @cholilnafis, memposting sertifikat khotib yang ditanda tangani oleh KH Abdussomad Buchori, selaku Ketua Bidang Dakwah MUI dan Penegmabangan Masyarakat juga ditanda tangani oleh KH Cholil Nafis sendiri, selaku Ketua Komisi Dakwah MUI dan Pengembangan Masyarakat.



Gambar: dokumentasi sertifikat dai diposting Cholil Nafis di laman akun Instagramnya, @cholilnafis, pada Rabu 9 September 2020.

Guna membina dan meningkatkan kompetensi khotib agar dakwah lebih solutif maka MUI menetapkan Pedoman Dakwah Komisi Dakwah Se-Indonesia yang disusun oleh KH. Abdusshomad Buchori, Drs, Sholahudin Al-Aiyub, M. Si., KH. Cholil Nafis, Ph.D., KH. Fahmi Salim, Sc. MA., KH. Risman Mukhtar, M.Ag., KH. Drs. Ahmad Zubaidi, MA., dan KH. Dr. Samsul Maarif sebagai Tim Perumus. Pedoman dakwah tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal *Dzulhijjah* 1438 H atau 5 September 2017 M. Adapun pedoman dakwah yang ditandangani oleh Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin sebagai Ketua MUI saat itu dan Dr. H Anwar Abbas, M.M., M.Ag. sebagai Sekretaris Jenderal MUI pada waktu adalah sebagai berikut:

No.	Pedoman Dakwah Komisi Dakwah Se-Indonesia	
1.	Ketentuan umum	<p>1. Dakwah merupakan aktivitas dengan sifat menyeru serta mengajak manusia taat dan beriman kepada Allah SWT selaras dengan akidah, syariat, dan akhlak Islam serta upaya meningkatkan taraf hidup diri sendiri maupun orang lain, jasmani dan rohani serta kehidupan dunian dan akhirat.</p> <p>2. Pedoman dakwah merupakan rujukan etis yang jadi sumber bagi para juru dakwah dalam mensyiarakan syariat Islam.</p> <p>3. Dai merupakan juru dakwah dengan katagori: a) dai <i>muballigh</i> yakni, penceramah yang mensyiarakan syariat Islam melalui metode tulisan atau tulisan. b). aktivis dai yakni, mereka yang mempraktikkan aktivitas dakwah pemberdayaan umat.</p> <p>4. <i>Mad'u</i> merupakan sasaran dari kegiatan dakwah.</p> <p>5. <i>Maddah</i> merupakan materi dakwah itu sendiri.</p> <p>6. <i>Wasilah</i> merupakan perantara dari terlaksananya syiar Islam.</p> <p>7. <i>Manhaj</i> dakwah merupakan jalan atau metode dakwah</p> <p>8. <i>Islam wasthiyah</i> adalah transmisi kandungan Agama Islam dengan mengedepankan 10 ciri: <i>Ttawassuth</i> (menempuh jalan moderat), <i>tawazun</i> (berkesinambungan atau seimbang), <i>I'tidal</i> (lurus dan tegas), <i>tasamuh</i> (toleran), <i>musawah</i> (egaliter tanpa diskriminasi), <i>syura</i> (musyawarah), <i>islah</i></p>

		(reformasi), <i>awlawiyah</i> (mengedepan prioritas), <i>tathawwur wal ibtikar</i> (dinamis, kreatif, dan inovatif), dan <i>tahaddur</i> (berkeadaban).
2.	Visi-misi dakwah	<p>1. Visi dakwah merupakan syiar Agama dengan nilai-nilai <i>wasthiyah</i>.</p> <p>2. Misi dakwah merupakan terciptanya umat muslim yang bukan saja paham tapi mempraktikkan nilai Islam <i>wasatiyah</i>.</p>
3.	Tujuan dakwah	<p>1. Terciptanya umat Islam yang konsisten pada akidah, syariat, dan akhlak Islam dalam garis <i>manhaj Ahlus sunnah wal jamaah</i> serta tangguh dalam menghadapi rongrongan akidah, faham, dan pemikiran yang salah seperti upaya pemurtadan.</p> <p>2. Terciptanya umat muslim pelopor, pemakmur, dan rahmat bagi semesta alam.</p> <p>3. Terciptanya umat muslim yang berkomitmen pada Pancasila dan <i>Bhenika Tunggal Ika</i> dalam kesatuan RI.</p>
4.	Integritas dan kompetensi dai	<p>1. Integritas juru dakwah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kualitas hati yang mencerminkan kematangan psikologis dan spiritual. Kualitas lisani yang mencerminkan pengendalian dan penggunaan dengan tutur kata benar, halus lembut, tepat, efektif, dan efesien. Kualitas keilmuan artinya juru dakwah memiliki integritas normatif aplikatif seperti penguasaan dalil Alquran dan Alhadis secara bacaan

	<p>(<i>tilawatan</i>), pemahaman (<i>fahman</i>), pengamalan dalam sehari-hari (<i>tahtbiqan</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> d. Kualitas fisik seperti sehat jasmani, energik, prima penuh vitalitas. e. Kualitas ekonomi artinya penceramah punya bekal ekonomi yang cukup berdikaria sebab kemelaaratana ekonomi berpotensi besar jadi kendala keberlangsungan dakwah. <p>2. Kompetensi yang perlu dimiliki penceramah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan <i>tabligh</i>; kemampuan mengkondisikan sasaran dakwah; mengerti sistematika penyampaian, intonasi, dan aksentuasi; memahami kebutuhan jamaah; kepekaan terhadap situasi dan kondisi; dan kepiawaian menampilkan karakter dan nilai jiwa. b. Kompetensi <i>irsyad</i> meliputi: kemampuan menggunakan kecerdasan dan memelihara intelektual, emosi dan spiritualitas; kemampuan komunikasi dua arah dan seni memahami serta menghadirkan solusi atas problem yang tengah dihadapi jamaah; dan mampu mengkalsifikasikan karakter jamaah. c. Kompetensi <i>mudabbir</i> meliputi: berjiwa besar dan amanah; berkepribadian santun dan rendah hati; berwawasan luas dan berdedikasi tinggi; berjiwa <i>leadership</i> dan berorientasi
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>penyelesaian masalah.</p> <p>d. Kompetensi <i>muthawwir</i> meliputi: kecerdasan bersosial dengan masyarakat; kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat dan membuat konsep solusinya; kemampuan menjaga karakter positif dan memelihara kredibilitas di tengah jamaah.</p> <p>e. Kompetensi <i>murabbi</i> meliputi: kecakapan mengasah, mengasuh dan mengayomi kebutuhan spiritual, keilmuan pribadi, dan objek dakwah; kecakapan menjadi suri teladan bagi masyarakat; kemampuan mengevaluasi dan memonitor perkembangan dakwa; kemampuan kaderisasi dakwah dalam lingkup keluarga dan masyarakat.</p>
5.	Objek dakwah	Objek dakwah merupakan setiap umat manusia baik yang beriman (muslim atau mukmin) dan tidak beriman secara individu maupun institusi. Secara lebih rinci, objek ini diklasifikasikan menjadi dua bagian: muslim atau mukmin yakni orang yang sudah memeluk agama Islam; dan non muslim yaitu orang yang memeluk agama selain Islam.
6.	Metode dakwah	<p>Maksud dari metode dakwah hendaknya dakwah disyiaran dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hikmah maksudnya mensyiarakan kebenaran dengan perkataan dan tindakan yang bijaksana. 2. <i>Mau'izhah hasanah</i> yaitu bentuk nasehat atau peringatan melembutkan hati sehingga mampu

		<p>mendorong pada perbuatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. <i>Mujadalah</i> yaitu diskusi, dialog, dan debat dengan cara sangat baik (<i>bil lati hiya ahsan</i>). 4. Menggunakan media dan sarana dakwah: mimbar jumat, <i>khalaqah</i> atau pengajian, medai cetak juga media elektronik. 5. Dakwah virtual yakni pemanfaatan internet guna mensyiarcan ajaran Agama. 6. Dakwah komunitas yakni, kegiatan dakwah yang konsentrasi pada komunitas-komunitas seperti pasien rumah sakit dan keluarganya, profesional, pengusaha, pejabat pemerintahan dan seterusnya. 7. Dakwah pemberdayaan yakni, aktivitas dakwah melalui penguatan ekonomi umat, penanganan bencana, dan lainnya. 8. Dakwah khusus, kegiatan dakwah yang secara spesifik diperlakukan untuk mencegah pemurtadan, mengantisipasi konflik sosial, memutus aliran sesat, narapidana, anak jalanan, marginal kota, korban narkoba, <i>free sex</i> dan seterusnya. 9. Dakwah terorganisasi adalah kegiatan dakwah yang berlangsung secara berkala melalui program pemberdayaan dengan kurikulum dakwah yang terpadu, terarah dan tepat sasaran serta mengerahkan semua sumber daya organisasi.
7.	Materi dakwah	<p>Materi yang menjadi prioritas utama dalam kegiatan dakwah adalah tema sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pesan persatuan dan solidaritas umat Islam.

	<p>Korleasinya dengan tema ini, maka penting membicarakan dan menanamkan pentingnya <i>ukhuwah islamiyah</i>, <i>ukhuwah wathaniyah</i>, dan <i>ukhuwah insaniyah</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pergeseran sosial ke arah yang lebih bernilai islami. Pergeseran ini bisa ditempuh dengan dua tahap: a) tahap pemahaman, keyakinan, dan akhlak dari dalam diri sendiri (<i>taghyir ma bil-anfusih</i>). b) Tahap perubahan kondisi sosial seperti dijelaskan dalam alquran, “<i>Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga merubah kkeadaan yang ada pada diri sendiri</i> (QS: al-Ra’d. 13: 11). 3. Pertahanan mengokohkan akidah dan pengamalan ibadah meliputi: a) rukun iman. b) rukun Islam. c). hikmah-hikmah ibadah sunnah. d). dzikir dan doa. 4. Penguatan karakter dan akhlak mulia. Hal ini sebagai penerapan dari nilai-nilai <i>ihsan</i> seperti akhlak kepada Allah SWT., akhlak kepada Rasulullah SWA., akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada sesama makhluk hidup, dan akhlak dalam lingkungan sosial. 5. Penguatan aktivitas muamalah dan ekonomi syariah meliputi: a) jual beli, b) simpan pinjam, c) wakaf bangunan, uang, dan produktif, e) riba, f) konsumsi makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik halal. 6. Ketahanan karakter dan penguatan keluarga
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>muslim meliputi: a) persiapan menuju pernikahan, b) hak dan kewajiban suami istri, c) hak dan kewajiban anak, d) pengasuhan anak (<i>parenting</i>) islami.</p> <p>7. Perlindungan umat dari gangguan aliran sesat yakni memperkenalkan pedoman untuk mengidentifikasi aliran sesat: a) mengingkari rukun Iman yang enam dan rukun Islam yang lima atau salah satunya. b) yakin dan mengikuti akidah yang bertentangan dengan Alquran dan Alhadis. c) meyakini adanya kitab setelah Alquran. d) mengingkari keaslian dan atau kebenaran Alquran. e) memberi tafsiran terhadap Alquran tanpa berdasar pada kaida-kaidah tafsir. f) mengingkari status hadis sebagai sumber ajaran Islam. g) Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para Nabi dan Rasul. h) Mengingkari Nabi Muhammad SAW., sebagai Nabi <i>akhiruzzaman</i> dan Rasul terakhir. i) Mengubah (dalam artian menambah atau mengurangi) pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat seperti haji bukan ke <i>Baitullah</i>, salat fardlu bukan lima waktu. j) Mengkafirkan orang Islam tanpa dalil syariat seperti mengkafirkan orang Islam hanya karena bukan kelompoknya.</p> <p>8. Penguatan pemahaman <i>siyasah syar'iyyah</i> meliputi: a) pentingnya kepemimpinan muslim. b) kreteria dan konsep <i>ulil amri</i> yang harus diupatihi. c)</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>kewajiban berpegang pada hukum Islam dalam bingkai NKRI. d) membantah <i>syubhat</i> terkait penerapan <i>syariah</i> dalam konteks Indonesia. e) meluruskan pemahaman sekularisme, liberalisme, dan pluralism Agama dalam konsep <i>nation state</i>.</p> <p>9. Penguatan pengamalan kerukunan antar umat beragama meliputi: a) <i>ukhuwah wathaniyah</i> dan <i>ukhuwah basyariah</i>. b) prinsip saling menghargai antara umat beragama dan kebhinekaan. c) konsisten untuk tidak melakukan konversi Agama di kalangan umat yang sudah beragama. d) komitmen untuk tidak menghina keyakinan agama lain. e) bebas tidak berarti sah menghina atau menodai agama.</p> <p>10. Penguatan pemahaman pentingnya bela Negara dan penguasaan keagamaan meliputi: a) muslim cinta tanah air. b) cinta negara bagian dari iman. c) konsep jihad dalam Islam. d) bahaya terorisme atas nama agama. f) wawasan kebangsaan dengan menyampaikan hasil <i>ijitma ulama</i> se-Indonesia prihal problem strategis kebangsaan (<i>masail asasiyah wathaniyah</i>).</p>
8	Kode etik dakwah	Juru dakwah dalam melakukan aktivitas dakwahnya hendaknya tetap mengedepankan karakter lemah lembut (<i>layyinah</i>), sukarela tanpa memaksa (<i>tathawwu'iyyan</i>), menghargai adanya perbedaan (<i>tasamuhiyyan</i>), mencintai sesama pelaku dna sasaran dakwah (<i>tawaddudiyan wa tarahumiyan</i>).

	<p>Selanjutnya, setiap juru dakwah senantiasa memelihara dan mewaspadai dari hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesatuan antara ucapan dan perbuatan 2. Jangan sampai melakukan pencampuradukan ibadah dan akidah agama-agama. 3. Memelihara untuk tidak menghina sesembahan agama lain. 4. Mengedepankan sikap adil serta tidak membeda-bedakan sasaran dakwah. 5. Tidak meminta dan tidak menetapkan jumlah imbalan. 6. Memelihara diri dari pergaulan yang berpotensi mengundang <i>syubhat</i> dari masyarakat. 7. Berkomitmen untuk tidak mensyiarluhan hal-hal yang yang tidak diketahui serta tidak memiliki kompetensi di dalamnya. 8. Menganggap semua pelaku dakwah sebagai mitra yang saling membantu bukan pesaing yang saling menghinakan. 9. Melaksanakan kegiatan dakwah dengan sumber dana yang halal dan tidak mengikat. 10. Fatwa-fatwa hendaknya merujuk pada pendapat-pendapat dan putusan lembaga kagamaan yang <i>mu'tabarah (ijma' almajami')</i> terutama fatwa-fatwa MUI dalam isu-isu dakwah dan keumatan.
	<p>Kegiatan dakwah yang disyiarkan kepada sesama umat Islam hendaknya dimaksudkan untuk memantapkan keimanan dan keislaman yang bila tidak dipraktikkan</p>

	<p>dengan bijak justru hanya mendatangkan pertikaian. Oleh karena itu, para juru dakwah harus mengedepan moral dalam mensyiarakan Islam. untuk mencapai target tersebut maka MUI merumuskan kode etik yang wajib dipraktikkan oleh dai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua muslim memandang seluruh orang Islam sebagai saudara seiman sehingga harus diperlakukan dengan mata kasih sayang berrlandaskan kejujuran, memupuk solidaritas dan rasa empati serta menjauhi perrasaan antipati, menghilangkan kebencian dan hal-hal yang menyenggung yang berpotensi melukai. 2. Seluruh umat Islam menterjemah keimanan pada sikap yang melindungi tanpa prilaku yang menjatuhka. 3. Umat Islam menjunjung persamaan dengan menjadikan organisasi sebagai alat dan tanpa menjadikan organisasi sebagai tujuan. 4. Setiap organisasi Islam dn lembaga keislaman memandang organisasi dan lembaga lain sebagai mitra kerjasama untuk saling mendukung perjuangan atas dasar berlom-lomba dalam kebaikan. Jangan sampai menanam benih-benih dan mengeksplorasi budaya untuk dijadikan alat mempertentangkan, bentrok, apalagi memeliharan persaingan yang buruk. 5. Dalam kehidupan politik, seperti pada pemilihan untuk jabatan politis maka umat Islam dan lembaga
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>keagamaan menomorsatukan kehendak bersama dan menjadikannya sebagai prioritas dibanding kepentingan kolega atau organisasi.</p> <p>6. Seluruh pimpinan organisasi keagamaan dan tokoh wajib memelihara nuansa silaturahmi tanpa mempedulikan keragaman ras, suku, maupun aliran politik dan organisasi yang berbeda.</p> <p>7. Seluruh pimpinan organisasi dan tokoh Agama tidak memperunyam masalah perbedaan, tidak memperuncing perbedaan madzhab dan hasil ijtihad sehingga jangan sampai memperkeruh dengan menggap kelompok lain salah dan mengklaim kelompok sendiri yang paling benar.</p> <p>8. Hubungan antara kelompok Islam harus terbangun di atas pondasi yang menjunjung prasangka baik serta saling menghargai untuk kemudian dapat memberi kontribusi terhadap keummatan.</p> <p>9. Segala tahanan dan prestasi satu kelompok organisasi harus diterima sebagai tahanan prestasi keseluruhan umat manusia dan organisasi lain secara suka rela mengapresiasi, melindungi, dan menghormatinya.</p> <p>10. Semua umat Islam konsisten memandang sesamanya di berbagai belahan negara sebagai bagian untuk kemudian tetap saling bantu-membantu dan menjunjung solidaritas yang tinggi.</p>
9.	Wawasan dakwah	Penceramah sebagai penyiar Islam hendaknya harus memiliki wawasan antara lain:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawasan keagamaan yakni, wawasan keislaman yang moderat serta memahaman secara menyeluruh. 2. Wawasan keluarga yakni, pengetahuan tentang keluarga dalam pembinaan mental dan pembentukan moral. 3. Wawasan kesatuan yakni, umat Islam adalah <i>ummatan wahidatan</i> yang diwujudkan dalam semangat solidaritas, belas kasih, tolong menolong, tetap toleran walaupun memiliki pandangan, pemahaman, dan orientasi politik berbeda. 4. Wawasan kebangsaan yakni, pemahaman bahwa NKRI dibentuk berdasarkan kesepakatan di atas kemajemukan yang melibatkan partisipasi umat Islam. Dengan demikian, umat Islam harus mempertahankan andilnya dari segala bentuk rongrongan untuk meruntuhkan. 5. Wawasan kebudayaan yang mana kebudayaan merupakan cipta, rasa, dan karsa manusia. Dengan demikian, kebudayaan harus dijaga di atas nilai keislaman. 6. Wawasan ekonomi yakni, sebuah sistem dan kebijakan perekonomian yang betul-betul memihak pada kepentingan rakyat kecil tanpa harus mencabik hak individu masyarakat dengan asas keadilan. 7. Wawasan moral. Kegiatan dakwah harus
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>dipraktikkan dengan prilaku akhlak yang mulia sebab kualitas budi pekerti merupakan target utama dari kegiatan dakwah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Wawasan politik. Agama Islam tidak mendikotomi antara Agama dan Negara justru Islam memberikan pijakan etika dan moral politik yang dibingkai dalam kaidah-kaidah tauhid dan syariat. 9. Wawasan hukum dan penegakan HAM. Islam merupakan Agama dengan esensi ajarannya yang menjunjung ketentraman dan kedamaian sehingga hak dan kewajiban diatur dalam syariat tanpa mengesampingkan hukum yang berlaku di Indonesia. 10. Wawasan pendidikan dan iptek yakni, epistemologi pengetahuan harus berpegang pada tauhid dan <i>Islamic wordview</i> sehingga ketinggian iptek mengantarkan pada penghambaan kepada Allah SWT. 11. Wawasan masyarakat madani. Sosial masyarakat tidak menghendaki sekuler dan liberal tetapi dibingkai dengan moral atau akhlak. 12. Wawsan pembelaan kaum <i>dhu'afa</i> bahwa pembelaan diberikan kepada kaum margina dan tidak menghendaki eksploitasi dengan mengusung pemberdayaan dan kemandirian. 13. Wawsan pembagunan. Artinya, dakwah memiliki tujuan kesejahteraan tentu dengan arahan <i>billisan, bil hal, dan bil qalm</i>. Dengan paduan tiga arahan
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>tersebut dakwah diharapkan mewujudkan kesejahteraan yang maksimal.</p> <p>14. Wawsan tentang problematika umat yaitu, pemahaman terhadap problematika keumatan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Pundak juru dakwah memikul misi kenabian untuk mengentaskan persoalan-persoalan umat manusia.</p> <p>15. Wawasan lingkungan hidup. Kegiatan dakwah secara mendasar juga memiliki orientasi untuk memelihara lingkungan tanpa membuat kerusakan di muka bumi.</p>
10.	Dewan etik dakwah	<p>1. Tentang adanya pelanggaran terhadap etika dakwah maka pengaduan masyarakat dan pemantauan media terhadap prilaku dakwah akan dirujukkan kepada Dewan Etik Dakwah Nasional yang dibentuk oleh pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI).</p> <p>2. Dewan Etik Dakwah setidaknya terdiri dari ketua MUI bidang dakwah, Wakil Sekjen MUI bidang dakwah, satu unsur dewan pertimbangan MUI, ketua dan wakil ketuan komisi dakwah, sekretaris komisi dakwah.</p> <p>3. Fungsi dewan etik dakwah nasional untuk memberi arahan konten, panduan etika, dan pengawasan terhadap pelaku dakwah baik di ranah media cetak, televisi, virtual, media elektronik, dan seterusnya.</p> <p>4. Dewan etik dakwah bisa dibentuk dari tingkat</p>

		lokal yakni, Provinsi, Kabupaten atau Kota yang dicuvervis oleh MUI Daerah dengan tetap selaras dengan aturan yang berlaku.
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pedoman dakwah MUI dan wacana Sertifikasi khotib Kemenag RI sejatinya sama-sama menjadi sebuah upaya instansi negara untuk mendorong para khotib agar ketika menyampaikan pesan Agama selaras dengan aturan main dalam Agama Islam itu sendiri. Apalagi, Agama sebetulnya adalah nasihat maka narasi-narasi para khotib menarasikan nasihat harus tidak bertolak belakang dengan garis-garis yang telah diatur. Banyak orang oang minim pengetahuan dakwah, namun menjadi penceramah yang kemudian berpotensi menyumbangkan paham-paham ekstremisme yang bisa dilihat dari mengemukanya penceramah yang marah-marah serta menjadi provokator. Selain itu, ada nota kesepahaman (MoU) antara MUI dengan Kemenag dan Komisi Penyiaran Indoensia terkait para khotib yang biasa berceramah termasuk berceramah di televisi. Di sinilah segmentasi atau pembagian tugas dan kewajibannya diatur jelas bahwa MUI mengurus syariat, KPI penyiarannya, dan Kemenag mendukung sosialisasi dan membuat regulasi agar mengkomunikasikan pesan-pesan langit tetap berada dalam lajur nilai-nilai kenabian. Apalagi, selama ini banyak khotib yang ditengarai terpapar pemikiran radikal dan mendukung paham-paham yang merongrong ideologi negara.

Sikap para khotib harus ilmiah dan amaliyah dalam berbagai permasalahan. Ilmiah berarti harus berasaskan pada ilmu Alquran sunnah atau hadis yang diimbangi

dengan pemahaman secara komprehensif. Adapun amilyah berarti sebuah sikap pengamalan, praktik serta contoh terhadap pesan-pesan Alquran dan sunnah dengan diikhlaskan semata-semata karena Allah bukan untuk kepentingan material, serta pribadi, bukan juga untuk kepentingan kelompok apalagi kepentingan pelampiasan hawa nafsu. Lebih dari itu, faktor yang menjadi kunci penentu kesuksesan seorang khotib dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam terletak pada kesungguhan dan keikhlasan dalam melakukan aktivitas dakwah.¹³

c. Sertifikasi Khotib Formulasi Profesionalitas Khotib

Praktik dakwah harus dilaksanakan dengan baik agar tujuan dakwah tercapai dengan efektif maka khotib sebagai juru dakwah harus mempunyai kemampuan dibidang yang berkelindan dengan tugas dakwahnya. Oleh karena itu, semakin khotib memiliki bekal yang profesional maka keberhasilan tugas dakwah kian terbuka lebar. Tugas dakwah bisa tercapai dengan mudah apabila khotib dibekali dengan kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengannya. Wacana sertifikasi sejak awal munculnya didengungkan sebagai upaya dalam merumuskan khotib-khotib yang memiliki kompetensi. Samsul Munir merumuskan formulasi khotib profesional setidaknya memiliki kompetensi-kompetensi tersebut antara lain:¹⁴

¹³ Samsul Munir, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 87.

¹⁴ Slamet Muhamimin Abda, *Prinsip-Prinsip Metodologi Dakwah*, (Surabaya: al-Ikhlas, 1994). Hlm. 69-77.

1) Kemampuan Berkomunikasi

Dakwah merupakan kegiatan yang melibatkan lebih dari satu individu yang berarti ada proses komunikasi di dalamnya. Dalam proses dakwah, komunikasi sangat variabel yang menuntut khotib memiliki kemampuan khusus agar pesan-pesan yang disampaikan mudah diterima dan tidak menyenggung jamaahnya. Dengan demikian, khotib sebagai komunikator dalam menyampaikan ajaran Islam harus sejalan dengan komunikasi-komunikasi yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Harjani Hefni mengatakan hendaknya proses penyebaran pesan atau komunikasi itu disampaikan dengan bentuk sebagai berikut:¹⁵

- a) *Qaulan sadidan* yakni penyampaian pesan yang benar dan tepat dengan kondisi yang ada. Allah berfirman dalam surah *an-Nisa'* (4) ayat 9:

وَلِيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرَيْةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَإِنَّقُوا اللَّهَ وَلِيُنْقُلُوا قَوْلًا
سَدِيدًا

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah prang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*¹⁶

- b) *Qaulan layyinan* yakni penyampaian pesan yang lemah lembut, lunak, tidak memvonis, mengingatkan tentang sesuatu yang disepakati seperti kematian,

¹⁵ Harjani Hefni, *Komunikasi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015). Hlm. 265-267.

¹⁶ QS. *an-Nisa'* (4:9). (CV. Al-Hidayah: Surabaya. 2002). Hlmn. 71.

dan memanggilnya dengan panggilan yang disukai. Allah berfirman dalam surah *Thaha* (20) ayat 44:

فَقُوْلًا لَهُ قَوْلًا لَيْتَنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

Aartinya: *Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut.*¹⁷

- c) *Qaulan ma'rufan* yakni penyampaian pesan yang baik, ramah tidak kasar, tidak menyinggung perasaan orang, tidak kotor, dan tidak mengundang nafsu orang yang mendengarkan atau membacanya untuk berbuat jahat. Allah berfirman dalam surah *an-Nisa'* (4) ayat 8:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْفُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا
مَعْرُوفًا

Artinya: *Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.*¹⁸

- d) *Qaulan maysuran* yakni penyampaian pesan yang mudah, menyenangkan, memberikan harapan, kepada orang dan tidak menutup peluang komunikasi untuk mendapatkan kebaikan. Allah berfirman dalam surah *al-Isra'* ayat 28:

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا

¹⁷ Qs. Thaha. (20:44). (CV. Al-Hidayah: Surabaya. 2002). Hlmn. 284.

¹⁸ Qs. *an-Nisa'* (4:8). (CV. Al-Hidayah: Surabaya. 2002). Hlmn. 78.

Artinya: *Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas.*¹⁹

- e) *Qaulan kariman* yakni penyampaian pesan yang mulia dan berharga, lawan dari kata murahan atau tidak punya nilai. Allah berfirman dalam surah *al-Isra'* ayat 23.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًاٌ إِمَّا يُبْلِغُنَ عِنْدَكُمُ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاًهُمَا فَلَا
تَنْهَىٰ لَهُمَا أَفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: *Dan Tuhamnu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.*²⁰

- f) *Qaulan tsaqilan* yakni penyampaian pesan yang berbobot dan penuh makna, memiliki nilai yang dalam, memerlukan perenungan untuk memahaminya, dan bertahan lama. Allah berfirman dalam surah *al-Muzzammil* ayat 5:

إِنَّا سَنُنْقِي عَلَيْنَا قَوْلًا ثَقِيلًا

Artinya: *Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang benar.*²¹

- g) *Qaulan balighan* yakni perkataan yang sampai pada maksud, berpengaruh dan berbekas pada jiwa. Allah berfirman dalam surah *al-Nisa* ayat 63:

¹⁹ Qs. *al-Isra'*. (17: 28). (CV. Al-Hidayah: Surabaya. 2002). Hlmn. 258.

²⁰ Qs. *al-Isra'*. (17: 23).(CV. Al-Hidayah: Surabaya. 2002). Hlmn. 257.

²¹ Qs. *al-Muzzammil*. (73: 5).(CV. Al-Hidayah: Surabaya. 2002). Hlmn. 518.

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرَضْ عَنْهُمْ وَعِظِّمُوهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا

Artinya: *Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka.*²²

- h) *Ahsanu qaulan* yakni menyampaikan perkataan pilihan kata terbaik. Allah berfirman dalam surah *Fushshilat* ayat 33:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّمَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: *Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri.*²³

Begitu indah Agama Islam mengatur soal bagaimana pesan-pesan disampaikan apalagi yang berkaitan langsung dengan penyampaian ajaran Islam seperti penceramah kepada jamaahnya. Sebab menyebarkan Islam dengan kata-kata positif sangat berpengaruh bagi kebahagiaan seseorang dalam kondisi apapun orang tersebut berada. Pribadi-pribadi yang sering mengirim pesan positif kepada khalayak akan menyimpan modal yang banyak untuk berbuat yang positif. Begitu juga di kancah ceramah Agama agar semaksimal mungkin ungkapan-ungkapan tercela tidak diucapkan. Lebih dari itu, penyampaian pesan dengan menggunakan kata-kata positif tidak hanya kepada sesama manusia termasuk juga kepada

²² QS. an-Nisa' (4:63). (CV. Al-Hidayah: Surabaya. 2002). Hlmn. 80.

²³ Qs. Fushshilat. (41: 33). (CV. Al-Hidayah: Surabaya. 2002). Hlmn. 433.

binatang. Isa bin Maryam jika melihat babi di jalan beliau mengusirnya dengan kata-kata positif.

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعْيِدٍ أَنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لَقِيَ حَنْزِيرًا بِالطَّرِيقِ فَقَالَ لَهُ افْذُ
بِسْلَامٍ فَقِيلَ لَهُ تَقُولُ هَذَا لِحَنْزِيرٍ فَقَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَعُوذُ لِسَانِي الْمُنْطِقِ
بِالسُّوءِ

Artinya: *Dari Yahya bin Sa'id, sesungguhnya Isa bin Maryam apabila bertemu dengan babi di jalan dia berkata: keluarlah dengan keselamatan. Ada yang bertanya kepadanya, engkau berkata seperti itu untuk seekor babi? Isa menjawab, Aku khawatir untuk membiasakan lidahku mengucapkan yang jahat.*²⁴

2) Kemampuan Menguasai Diri

Khotib ibarat seorang pemandu jalan yang bertugas menunjukkan arah bagi orang yang kebingungan agar dapat memahami dan berjalan di lajur yang benar. Tanpa diarahkan dan tanpa bimbingan dari pemandu, orang yang kebingungan bisa terperosok pada jalan buntu bahkan tersesat karena akan menyimpang dari tujuan semula. Sebagai pemandu sudah semestinya khotib bersikap bijaksana, sabar, dan penuh kedewasaan dalam menunjukkan, mengajak, serta membimbing orang yang tengah bingung atau lupa. Bahkan, dalam keadaan tertentu, seorang khotib sebagai pembimbing harus mampu menjelaskan tentang sesuatu yang belum dipahami sekalipun tidak yang dipandunya tidak meminta.

Di sinilah letak penting khotib sebagai penunjuk arah harus mampu menguasai diri tanpa mengesankan sifat-sifat congkak, angkuh, kaku dan prilaku negatif lain karena sifat dan prilaku tercela tersebut alih-alih membuat jamaah lebih

²⁴ Imam Malik, *Al-Muwattha* Juz 5, Hadist No. 3609, 1434.

dekat justru menghadirkan ketegangan. Konsekuwensinya, jamaah akan enggan dan menjauh tanpa mendengarkan semua petunjuk yang disampaikan sekalipun petunjuk yang disampaikan benar adanya. Khotib menyampaikan pengetahuan, kemampuan, dan kekuatan kepada obyeknya agar tetap tangguh dalam menghadapi problem serta dapat menciptakan masyarakat yang tidak mudah mengeluh, menyerah melainkan tetap teguh menegakkan nilai-nilai ajaran Islam.

Lebih-lebih sedari awal kelahirannya manusia tercipta dengan karakter yang unik sekaligus cenderung mudah terpengaruh pada lingkungan yang dihadapinya. Adapun tujuan dakwah untuk memperbaiki prilaku keagamaan masyarakat itu sudah jelas kebenarannya tanpa ada perdebatan. Lebih dari tujuan tersebut kegiatan dakwah harus mampu mensyiaran pesan-pesan Islam yang menyeluruh sehingga betul-betul dapat menjangkau hingga pada setiap sendi kehidupan umat Islam dengan harapan esensi Islam menjadi *way of life* dan *life styl*. Singkat kata, melalui sertifikasi khotib kegiatan mensyiaran Islam dimaksudkan oleh Kemenag RI agar pesan Islam *applied* atau dijadikan dalam melaksanakan tata kehidupan sehingga khotib tidak kembali pada model dakwah klasik yang tanpa memperhatikan sosial kondisi masyarakatnya.²⁵

²⁵ Seperti telah dijelaskan oleh Hodgson, belum dikenal persoalan mengenai tuntutan untuk mengakomodasi kepentinga-kepentingan yang berbeda, bahkan saling bertentangan antar kelompok etno-religius-kultural yang satu dengan yang lain sebab budaya yang berkembang pada waktu itu adalah monarki-otoriter. Pada masa Islam klasik, persoalan hak-hak sipil dan kelompok minoritas belum berkembang menjadi suatu wacana popular seperti saat ini -sebagai kelanjutan dari budaya politik demokrasi- sebab politik yang dianut pada masa itu adalah monarki absolute sehingga kebijakan yang berkembang adalah monokulturalis. Yakni, suatu kebijakan yang berusaha melebur keragaman ke dalam satu budaya dominan (*mainstream*). Contoh lain, ketika suatu rezim berkuasa dengan mazhab tertentu berkuasa maka biasanya mazhab lain dianggap sebagai sempalan. *Mihnah* sebagai

3) Kemampuan Pengetahuan Psikologi

Manusia adalah makhluk yang tidak mudah ditebak secara kasat mata sebab tangisnya belum tentu kesedihan dan tawanya tidak selalu kebahagiaan. Apa yang tampak pada manusia hanyalah gejala kejiwaan. Khotib sebagai pewaris para Nabi dalam menyampaikan pesan-pesan Agama maka ketika menyebarkan ajaran Islam harus memiliki bekal pengetahuan psikologi karena dengan pengetahuan ini khotib bisa lebih efektif menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Dengan bekal pengetahuan psikologi ini khotib juga dapat bersikap bijaksana dan tepat serta pantang putus asa dalam menghadapi jamaah yang jelas memiliki sikap dan kepribadian beraneka ragam. Khotib profesional harus memiliki pengetahuan psikologi terutama psikologi kepribadian yang membicarakan soal model dan sifat-sifat pribadi seseorang atau kelompok serta psikologi sosial yang membicarakan tentang karakter dan model kejiwaan manusia sebagai komunikasi dalam kegiatan dakwah.

Guna mencapai cita-cita ini, para khotib tidak bisa bekerja secara individu tetapi penting melakukan interaksi yang lebih intens dan persuasif dengan banyak komunitas etnis dan etno-religius di seluruh dunia.²⁶ Selayaknya, wacana sertifikasi

suatu bentuk ekskusi pandangan atau mazhab minoritas atas nama mayoritas dan berkuasa menjadi suatu yang lumrah dalam catatan sejarah Islam. Marshal Hodgson, *The Venture of Islam: Conscience and History in World a Civilazition, The Classical Age of Islam*, (Chicago: University of Chicago Press, 1947), h. 243-389.

²⁶ Paul F. Knitter, *One Earth Many Religion: Multifaith Dialouge and Global Responsibility*, Alih Bahasa Nico. A. Likumahuwa, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), h. 118.

bukan sekadar mengupdate *skill* dalam menyampaikan informasi keagamaan saja melainkan memacu gairah khotib untuk terus belajar, mencari, dan mendalami Agama sehingga khotib mampu menyampaikan ajaran Islam yang santun, moderat, dan menyegarkan. Apalagi di tengah keberagamaan masyarakat saat ini yang begitu hiruk-pikuk dengan pesan-pesan Agama yang sama-sama berlandaskan pada sumber Islam. Banyaknya informasi keagamaan tersebut mestinya menjadikan masyarakat menjadi pintar, arif, dan bijaksana bukan memacu emosi. Bahkan mimbar-mimbar keagamaan penuh reaktif bukan kreatif dan tidak jarang khotib satu dengan yang lain saling mencemooh. Wacana Sertifikasi khotib Kemenag RI sejatinya patut dianggap sebagai sebuah upaya untuk mendorong para khotib agar ketika menyampaikan pesan Agama selaras dengan aturan main dalam Agama Islam itu sendiri. Sebab, Agama sebetulnya adalah nasihat maka para khotib hendaknya menarasikan nasihat tidak bertolak belakang dengan garis yang telah diatur Agama.

Apabila di era modern khususnya di bidang kesehatan mental membutuhkan ahli atau psikolog maka hakikatnya juru dakwah adalah konsultan Agama yang harus mampu menyodorkan solusi terhadap problematika yang tengah dihadapi jamaahnya agar tetap dalam koridor yang telah ditetapkan oleh Allah yang Maha Esa. Kegiatan mensyiaran Islam malalui juru dakwah bisa tidak memiliki fungsi yang berarti bila kegiatan tersebut tidak dipakai untuk menyentuh pada persoalan yang tengah dihadipai atau solusi yang tengah dibutuhkan oleh jamaahnya. Apalagi, seorang khotib pada kenyataannya merupakan sosok *leader* atau *sayyidul qaum* yang hidup

ditengah-tengah masyarakat yang terus berubah -harus sadar dengan perubahan itu-segala macam perubahan di seluruh dunia yang diakibatkan oleh pesatnya perkembangan teknologi, majunya ilmu pengetahuan serta makin terbukanya dunia harus menjadi kesadaran mutlak bagi khotib itu sendiri.

Profesionalitas yang dimiliki khotib harus mampu mentransmisikan syariat Islam agar menjadi penggerak manusia meniti di jalan kebenaran yang mungkin selama ini telah bengkok dari jalan yang hak. Tentu, semua itu memiliki tantangan apalagi bila perubahan dan kemajuan berkelindan dengan budaya tradisional yang beralih budaya modern maka khotib harus menunjukkan kapsistasnya agar mudah melewati tantangan-tantangan dengan semakin mengedepankan kecermatan menangani, keterampilan yang baik serta kebijaksanaan yang tepat tanpa mengotori apalagi merusk citra Agama. Khotib juga sering dihadapkan pada keadaan sosial yang sedang bergejolak lantaran masyarakatnya telah dipengaruhi oleh diktatornya pengaruh ekonomi, rayuan teknologi, dan merajalelanya individualisme. Dalam setiap gejolak yang terjadi di tengah masyarakat, khotib hadir sebagai pembimbing yang ditaati fatwa-fatwanya tanpa perlu memaksa.

4) Kemampuan Pengetahuan Kependidikan

Manusia perlu pendidikan karena tanpa pendidikan manusia hampir tidak bisa dibedakan dengan hewan. Sebagai makhluk yang serba keterbatasan kemampuan, manusia perlu mengembangkan potensi-potensi untuk mencapai predikat makhluk yang paling mulia. Potensi yang perlu dikembangkan tersebut meliputi kognitif

(pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan). Khotib pada hakikatnya sebagai sang juru pendidik yang senantiasa berusaha meningkatkan dan mengembangkan kedewasaan keagamaan para jamaah. Oleh karena itu, sebagai pendidik, khotib harus mengerti, bertanggungjawab, dan memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kependidikan baik dalam konteks teknik, metode, ataupun strateginya sehingga dapat dengan mudah mencapai tujuan dakwah.

Dakwah bukan kegiatan yang kaku dan stagnan maka ia harus disegarkan dengan kontekstualisasi pada era kekinian demi menciptakan keguyuban hidup masyarakat krena itulah kegiatan dakwah jangan dibiarkan menjadi kegiatan yang penuh ketegangan.²⁷ Persoalan hidup yang dihadapi masyarakat cukup beragam mulai dari tatanan ekonomi, peleburan budaya, hingga polemik di bidang politik yang keseluruhan harus dicarikan solusinya. Di tengah pusaran persolan tersebut maka terdapat hal urgen yang jangan sampai manusia meluci satu tatanan mendasar bahwa segala tatanan kehidupan harus bersandar dan berlandaskan pada syariat Islam yang kemudian bisa dijumpai melalui kegiatan atau media dakwah. Sebagai kegiatan yang dipromosikan untuk keberlangsungan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat maka dakwah cukup luas cakupannya untuk dipraktikkan dalam segala aspek. Aspek tersebut secara bersamaan membutuhkan kepekaan para juru dakwah keluar dari zona yang menyulitkan dengan cara mengenali karakter jamaah, budaya sosial, dan

²⁷ Dakwah adalah menjadikan perilaku umat muslim dalam menjalankan ajaran Islam sebagai *rahmatan lil alamin* yang harus disampaikan kepada seluruh manusia, dan dalam prosesnya melibatkan unsur khotib, *maddah* (materi dakwah), penerima pesan (objek), dan *thariqah* (cara penyampaian), dengan *maqasid al-dakwah* (tujuan) mariah kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2011), h. 2.

kebutuhan sosial untuk kemudian dapat meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonomi jamaahnya.

5) Kemampuan Mengintegrasikan Pengetahuan Agama dengan Pengetahuan Umum

Keanekaragaman pengetahuan jamaah yang dapacu oleh kemudahan mengakses informasi-informasi baru melalui pesatnya perkembangan teknologi menuntut para khotib untuk tidak boleh ketinggalan informasi sebab khotib yang hidup dengan jamaah semcam itu tentu harus bisa mengimbangi informasi-informasi yang *up to date* agar kehadiran khotib tidak disepulekan. Maka khotib harus memperkaya diri dengan berbagai informasi atau isu yang bahkan secara sepintas dinilai bukan isu-isu yang bersifat agamis. Karena khotib memiliki tanggung jawab menyampaikan isu-isu yang ditinjau dari sisi Agama dan mengontekstualisasikan pesan-pesan Agama dengan isu-isu terbaru sehingga pemahaman terhadap agama tidak kaku dan tidak statis.

Agar jamaah tidak kecewa terhadap eksistensi khotib yang dianggap serba tahu sekaligus agar dakwahnya mudah diterima oleh setiap kelompok serta berbagai lapisan maka khotib harus memiliki pengetahuan keagamaan mempuni yang diimbangi dengan pemahaman kebangsaan. Lebih dari itu, khotib bukan sekadar orator tetapi dituntut mampu mempengaruhi guna menumbuhkan ketakwaan masyarakat Indonesia dengan pendekatan multikulturalisme. Maka kualitas pengetahuan keagamaan yang dimiliki khotib harus dikontekstualisasikan agar dapat

menyokong jamaah dalam memecahkan problem yang tengah dihadapi baik yang berkaitan dengan persoalan sosial ataupun yang bersifat privasi. Menyampaikan pesan Islam di atas dasar pemahaman multikultural secara otomatis telah mengaplikasikan pedoman dasar bangsa Indonesia yakni, *Bhenika tunggal ika*. Lebih-lebih juru dakwah bukan penyiар pesan Agama tetapi sekaligus sebagai suri teladan bagi masyarakat yang memikatnya dengan *bilhikmati wal mauidzatil hasanati*.²⁸

Kegiatan dakwah dengan menggunakan paradigma multikultural menjadi trobosan menarik karena memandang perbedaan dan keragaman sebagai keunikan yang tidak boleh dipaksa untuk sama agar interaksi sosial tetap berjalan harmoni penuh perdamaian.²⁹ Melalui gerakan dakwah berbasis pemahaman yang multikultural pula interaksi sosial selalu mengedepankan titik persamaan dalam perbedaan dan menjunjung toleransi dalam keberagaman.³⁰ Praktik dakwah yang berpijak pada

²⁸ Sebagai seorang yang akan menjalankan amanah Allah di altar bumi maka juru dakwah atau khotib harus memiliki sifat-sifat khusus yang mencerminkan sifat muslim sejati. Menurut Muhammad Gazali, sebagaimana dikutip oleh Hasjmy, bahwa ada tiga sifat dasar yang harus dimiliki khotib yakni, setia pada kebenaran, menegakkan perintah kebenaran, dan menghadapi semua manusia dengan kebenaran. Ketiga sifat tersebut adalah sikap hidup utama bagi para khotib yang hendak mengajak manusia ke jalan Allah SWT. A. Hasjmy, *Dustur Dakwah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 142-143.

²⁹ Jalaluddin Rakhmat dan Deddy Mulyana, *Komunikasi Antarbudaya: Panduan berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya*, (Bandung: Rosdakarya, 2003), h. 68.

³⁰ Jenis ini menjadi semacam jenis profil khotib yang dikehendaki di dalam dunia modern. Mereka mempergunakan pemikat kecakapannya untuk menyampaikan ajaran Islam yang kemudian dapat mengikat manusia di jalan yang dikehendaki Allah SWT. Kecakapan menyajikan ajaran Islam secara benar dan pada waktu yang tepat tanpa menyenggung individu maupun kelompok. Pada konteks Indonesia yang pluralistik, *hikmah* dalam berdakwah merupakan hal yang strategis. Dengan *hikmah* itulah maka dapat dirumuskan sebuah konstruksi dakwah yang inklusif, yaitu dakwah yang berpandangan bahwa siapapu dalam kehidupan ini adalah bagian dari kita. Kurniawati Syam, "Dakwah dalam Perspektif Modernisme, Antisipasi Menuju Postmodernisme," Vol. 6. No. 1 (2005). Dengan pandangan seperti ini maka dakwah bisa berperan menjadi mediator yang efektif untuk menyatukan umat yang mungkin sudah tercabik-cabik lantaran terpecah belah; dakwah yang mampu menstimulasi rasa persaudaraan di antara sesama manusia terlepas dari perbedaan etnis ataupun agama. Sebab Islam tidak mengajarkan umatnya untuk berpikir sepikah baik kepada sesama umat

multikultur menghadirkan ruang tersendiri agar aktivitas dakwah senantiasa *concern* terhadap upaya menyiarkan ajaran Islam menyesuaikan dengan konteks kemajemukan masyarakat sehingga menyediakan ruang dialog guna menemukan titik temu terhadap beberapa persoalan yang selama ini masih dipertentangkan.³¹ Terwujudnya, program sertifikasi khotib yang digulirkan Kemenag RI ini diharapkan dan semestinya dapat menjadi legitimasi dakwah berbasis multikulutur dan multi etno-religiusitas.

6) Kemampuan di Bidang Alquran dan Hadist

Kemampuan yang harus dimiliki khotib di bidang Alquran meliputi: *Pertama*, Ilmu Balaghah. Suatu bidang ilmu yang dapat membekali khotib untuk mengkaji, memahami, dan menentukan ayat-ayat yang *mubham*, *mujmal*, *nasikh-mansukh*, *tabyin* dan *taqyid* serta ayat yang berupa petunjuk anjuran dan petunjuk larangan. *Kedua*, Azbab al-Nuzul. Suatu ilmu tentang Quran yang membahsa mengenai sebab-sebab turunnya ayat Alquran. Melalui Ilmu tersebut khotib dapat mengetahui situasi, kondisi, dan kapan ayat tersebut diturunkan untuk selanjutnya dapat bisa dikontekstualisasikan pada zaman sekarang. *Ketiga*, Ilmu Kalam. Sebuah bidang yang membahsa tentang keesaan Allah sekaligus sifat-sifatNya yang wajib, muhal, dan jaiz. Dengan demikian, khotib dapat dengan mudah memperkenal Allah dengan segala keesaanNya. *Keempat*, Ilmu Qiraat dan Tajwid. Bidang ilmu yang membahas

Islam maupun sesama warga umat manusia. Luluk Fikri Zuhriyah, “Dakwah Inklusif Nurcholish Madjid,” Jurnal Komunikasi Vol. 2. No.2, (Desember 2012).

³¹ Ilyas Ismail, *Filsafat Dakwah: Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), h. 263-264.

tentang macam-macam bacaan yang diterima Rasulullah serta tata cara membaca Alquran yang benar. Tujuan dari menguasai bidang tersebut agar para khotib memiliki landasan yang benar dalam membaca ayat Alquran.

Kelima, Ilmu Ghoribil Quran, yaitu ilmu yang menerangkan makna kata-kata ganjil yang tidak terdapat dalam kitab-kitab biasa atau tidak terdapat dalam percakapan sehari-hari. *Keenam, Ilmu Wujuh wa al-Nnazhair*, yaitu ilmu yang menerangkan kata-kata dalam Quran yang memiliki banyak arti. *Ketujuh, Ilmu Ma'rifatu al-Muhkam wa al-Mutasyabih*, yaitu ilmu yang membahas tentang persesuaian antara ayat satu dengan ayat lain dalam Alquran dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. *Kedelapan, Ilmu Amtsali al-Quran wa Jidali al-Quran*, yaitu ilmu yang membahas pepatah atau perumpamaan dan membahas tentang perdebatan-perdebatan dalam Alquran. Kemampuan khotib di bidang Alquran ini harus didukung dengan kemampuan di bidang hadist sebagai sumber kedua dalam Agama Islam. Oleh sebab itu, khotib juga harus mampu menelaah status sahih, haasan, dan dlaifnya hadis serta mengenali sebab-sebab munculnya hadis. Selain itu, khotib harus memiliki kemampuan *Ilmu Talfikil Hadist* yakni, ilmu yang membahas tentang cara menyimpulkan hadis-hadis yang nampaknya bertentangan.

2. Teori Diskursus

Membicarakan diskursus atau wacana berarti secara otomatis berkaitan dengan nama Michel Foucault khususnya diskursif tentang pengetahuan. Menurut Foucault, seperti diungkap oleh Jager, bahwa suatu pengetahuan merupakan sebuah fenomena diskursif. Apabila setiap kelompok atau individu bercerita dan mengemukakan suatu realitas maka sesungguhnya pada aktu yang bersamaan mereka sedang tengah mempraktikkan interpretasi makna atau pengetahuan. Analisis wacana bekerja sebagai upaya mengenali pengetahuan tersebut menjadi suatu diskursus untuk memahami konteks pengetahuan atau kekuasaan yang menjadi objek kritiknya.³² Lebih lanjut Jager juga menerangkan bahwa analisis wacana bukan fokus pada apakah suatu wacana itu telah memotong alias mengubah pandangan terhadap realitas tertentu atau apakah interpretasi terhadap realitas itu betul-betul nyata tetapi lebih pada melihat bagaimana sebetulnya suatu realitas diproduksi dan mendapat dukungan pemberian dari masyarakat.

Melalui analisis kritis, Wodak menegaskan bahwa wacana adalah *language as social practice and takes consideration of the context of language use to be crucial*.³³ Artinya, segala ungkapan teks baik dalam wujud tulisan maupun bentuk ucapan harus dipahami sebagai konteks komunikasi yang berupaya membentuk sebuah praktik

³² Siegfried Jager, *Discourse and Knowledge: Tehoritical and Methodological Aspect of a Critical Discourse and Dispositive Analysis*, (Sage Publications, California, London & New Delhi. 2001.), hlm. 33.

³³ Ruth Wodak, *What CDA is about a Summary of its History, Important Conzept and its Developments*, dalam Ruth Wodak & Michael Meyer (ed.), *Methods of Critical Discourse Analysis*, (Sage Publications, California, London & New Delhi. 2001.), h. 1

dalam kehidupan sosial. Dengan artian yang cukup simpel, analisis wacana berupaya untuk membongkar relasi antara pernyataan atau teks dalam relasi bahasa dan kekuasaan. Memang betul adanya bahwa tidak semua bentuk pernyataan dapat dikategorikan sebagai wacana akan tetapi suatu pernyataan secara otomatis akan menjadi wacana ketika pernyataan tersebut diproduksi oleh individu yang memiliki atau memegang kekuasaan dalam struktur sosial,³⁴ termasuk di dalamnya pemilik jabatan dalam suatu organisasi keagamaan. Seperti diungkap Mils tentang definisi umum yang paling banyak dipakai terkait pengertian wacana adalah seluruh pernyataan baik dalam bentuk tulisan maupun lisan atau ucapan yang harus memiliki makna serta pengaruh di dalam kehidupan nyata.³⁵

Ide merupakan syarat utama dan pertama dari diskursus atau percakapan dan penulisan yang bersifat sosial. Di dalam dan di lintas bangsa terdapat diskursus yang berbeda-beda. Diskursus bersifat sosial. Pernyataan yang dibuat, kata dan makna kata yang digunakan tergantung pada tempat dan kegunaan alias di daerah mana dan untuk apa pernyataan tersebut dibuat. Mengenai diskursus masa kini telah menembus dan mengeksplorasi berbagai jalan di mana diskursus dirancang secara historis dan sosial untuk melahirkan sudut pandang lain yang berbeda dan tak sependapat dalam kejadian serta situasi yang diinterpretasikan oleh individu maupun golongan tertentu.

³⁴ *Ibid.* h 10.

³⁵ Sara Mils, *Discourse*, (Routledge: Londen & New York, 2001), h. 7.

Diskursus tentang segala sesuatu selalu berusaha mengumpulkan dan mengkombinasikan beberapa ide yang dibuat dan dinyatakan sehingga hal tersebut memiliki arti tidak ada kesatuan di dalamnya. Artinya, isu utama wacana dalam beberapa hal berkenaan dengan “posisi dan sudut pandang” bisa dikenali melalui dari mana orang berbicara dan pranata yang mendorong berbicara dan yang menyimpan serta mendistribusikan ide-ide yang dikatakan. Suatu diskursus juga bisa dikenali dengan institusi-institusi terkait dan posisi dari mana datangnya juga yang diutarakan oleh pembicara. Akan tetapi, posisi tersebut tidak ada dengan sendirinya dan sesungguhnya posisi ini dapat dipahamami sebagai pijakan (*standpoint*) yang diambil oleh diskursus tersebut melalui hubungannya dengan diskursus lain sebagai oposisi. Dalam rangka menghindari berbagai bahaya yang ditumbulkan maka diskursus diatur oleh institusi. Diskursus keagamaan dalam hal ini sertifikasi khotib yang diucapkan kepada pemuka Agama dapat berpengaruh pada jamaah Agama tersebut sebab walaupun sertifikasi khotib ditujukan pada pemimpin keagamaan secara bersamaan juga berpengaruh pada pengikutnya. Dengan demikian suatu diskursus memberi efek baik langsung atau tidak melalui kaitan-kaitan yang berkelindan dengan diskursus lain yang telah disampaikan sebagai tandingan.

Foucault mengajukan tiga definisi tentang apa yang dimaksud dengan diskursus.³⁶ Pertama, diskursus adalah semua ucapan atau teks yang memiliki makna dan pengaruh di dunia riil. Definisi ini digunakan secara umum oleh Faoucault

³⁶ Sara Mills, *Sebuah Piranti Analisis dalam Kajian Sosial*, (Jakarta: Penerbit Qalam , 2007), hlm. 9-10.

terutama ketika Foucault bicara tentang konsep diskursus pada tingkat teoritis yang kemudian menjadi pijakan dalam merumuskan definisi kedua dan ketiga. *Kedua*, diskursus adalah sekelompok *statement* yang dapat diindividualisasikan. Definisi ini lebih sering digunakan oleh Foucault ketika bicara tentang struktur-struktur tertentu yang berupaya mengidentifikasi kelompok ucapan yang tampak diatur melalui cara tertentu dan dianggap memiliki suatu kohärensi serta kekuatan umum. *Ketiga*, diskursus adalah suatu praktik teratur yang terkait dengan jumlah pernyataan.

Konsep wacana Foucault berkelindan dengan siapa memproduksi wacana dan efek apa yang mencuat akibat dari produk wacana tersebut. Wajar bila wacana tidak sedangkal memahami proposisi teks melainkan memproduk sesuatu yang jauh lebih dalam yakni, sebuah gagasan, konsep atau efek. Namun demikian, wacana tetap bisa dideteksi sejak awal dengan memperhatikan bagaimana sistematika suatu ide, opini, dan pandangan hidup diciptakan dalam suatu konteks tertentu yang kemudian mempengaruhi cara berpikir dan bertindak. Tesis yang nyintrik sekaligus ciri khas dari Foucault adalah relasi antara kekuasaan dan pengetahuan. Apabila kekuasaan pada umumnya hanya dimaknai sebagai sebuah kepemilikan, Foucault melompat lebih jauh bahwa kekuasaan adalah sebuah praktik yang berlangsung di mana-mana. Hal ini bisa dideteksi dari adanya aturan-aturan dan sistem regulasi yang menunjukkan bahwa suatu kuasa bekerja. Di sinilah kemudian kita mengenal sejumlah strategi kuasa prihal “kebenaran wacana” yang dianggap benar.

Mempraktikkan kekuasaan selalu diiringi oleh pengetahuan dan pengetahuan selalu didampingi oleh kekuasaan. Bagi Foucault praktik kuasa memproduksi berbasis pengetahuan. Singkatnya tidak akan ada kuasa tanpa pengetahuan dan sebaliknya. Meskipun begitu, kuasa tidak direpresentasikan dengan represi atau kekerasan melainkan melalui normalisasi lewat regulasi. Oleh karena kuasa tidak bersifat subjektif dan tidak diwujudkan penindasan maka kuasaan harus diselenggarakan dengan positif serta produktif sehingga publik tidak dikontrol lewat penyiksaan fisik melainkan dikontrol dan disiplinkan lewat wacana dengan menciptakan bentuk-bentuk kategorisasi baik-buruk yang menjadi pengendalian prilaku. Wacana membentuk atau mengkonstruksi peristiwa tertentu dan peristiwa tersebut “dilogikan” melalui narasi-narasi dengan merapikan tatanan spekulasi juga tatanan institusi. Dalam perosesnya, publik mengkategorisasikan juga menafsirkan pengalaman lewat struktur yang tersedia. Dengan adanya kekuasaan muncul wacana dominan dan wacan terpinggirkan. Artinya, sebuah ide atau gagasan yang didukung oleh kekuasaan seluruh elemen terkait maka memang layak untuk dipraktikkan termasuk gagasan Kemenag dalam mewujudkan khotib-khotib profesional.

3. Teori Narasi

Narasi merupakan suatu bentuk wacana yang sasaran utamanya adalah tindak-tanduk yang dijalin dan dirangkaikan menjadi sebuah peristiwa melalui rangkaian-rangkaian dalam satu-kesatuan. Narasi sebagai suatu bentuk wacana dapat berbentuk tulisan, lisan, dan bentuk lainnya. Bentuk narasi dapat dijumpai dalam model ekspositoris dan sugestif serta diperkuat melalui rasionalisasi.³⁷ Narasi ekspositoris mempersoalkan tahap-tahap kejadian dan rangkaian-rangkain fenomena kepada para pendengar. Runtun fenomena yang disajikan tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan sekaligus memperluas informasi para khalayak. Adapun narasi sugestif lebih pada rangkaian wacana yang disajikan dengan sekian macam gagasan sehingga merangsang daya khayal penerima wacana tersebut. Secara bersamaan, penerima gagasan dapat menarik suatu makna baru di luar dari apa yang diungkapkan secara eksplisit. Makna baru tersebut akan dapat dipahami setelah gagasan itu betul-betul terlaksana.

Setiap bentuk wacana tidak bisa menghindari narasi ekspositoris dan sugestif melalui bentuk narasi keagamaan dan kebangsaan. Dengan demikian, sangat jelas bahwa terlaksana dan terhambatnya suatu wacana dapat ditentukan lewat berbagai macam bentuk narasi baik yang bentuk ekspositoris atau sugestif. Narasi dengan bentuk ekspositoris dan sugestif ini lekat kaitannya dengan nalar. Inilah yang dimaksud oleh Donald B. Calne bahwa nalar dapat difungsikan sebagai benteng

³⁷ Gorys Keraf, *Argumentasi dan Narasi*, (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 124-125

pembela atau lawan terhadap Agama.³⁸ Calne menunjukkan bahwa melalui nalar, agama bisa memberi kebahagiaan (*happiness*) kepada banyak orang dan candu (*ecstasy*) bagi sejumlah orang. Batu-batu sendi Agama adalah penegasan yang bersahaja. Nalar dipakai untuk menjalankan lembaga-lembaga keagamaan lengkap dengan ulama, ibadah, dan tempat ibadahnya. Kaum agamawan juga menggunakan nalar untuk menjaga Agama agar tidak ketinggalan zaman. Namun demikian, nalar juga diposisikan sebagai kritik terhadap agama sebagaimana kedudukan advokat dalam sidang pengadilan. Ibarat dalam tanya jawab antara saksi yang meringankan dan advokat (*derect examination*), nalar dapat menjajaki dan membenarkan agama namun pada saat yang bersamaan nalar bisa mengayunkan kapak pemancung menyingkapkan ketidak-cocokan (*inconsistency*), fanatisme, dan penindasan dalam agama.



³⁸ Anggapan Calne tentang nalar sebagai pembela agama sebetulnya dipengaruhi oleh Montago yang menyatakan tidak bisa disangkal bahwa agama merupakan hiburan bagi yang sengsara, penyeguk bagi sakit, dan terkadang penghalang bagi yang jahat karena itu barangsiapa hendak menggugat atau meremehkannya tanpa memberi pengganti yang sedikit banyak sepadan maka patut dijadikan musuh bersama. Tentang nalar sebagai lawan agama, Calne dipengaruhi oleh Pascal yang menyatakan bahwa manusia tidak pernah berbuat jahat sempurna yang mereka perbuat karena keyakinan agama. Donald B. Calne, *Batas Nalar Rasionalitas & Prilaku Manusia*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2004), hlm. 203-243.

4. Teori *Groupthink*

Mengkomunikasikan suatu gagasan atau ide kepada publik tidak pernah lepas dari adanya perbedaan dan persamaan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. *Groupthink* adalah penggunaan logika berpikir yang ditempuh oleh suatu kelompok. Irving Janis pencetus teori *groupthink* (logika berpikir kelompok) menyatakan setiap kelompok memiliki pemahaman tersendiri dalam memandang suatu fenomena. Terdapat beberapa persoalan dalam logika pemikiran kolompok menurut Irving Janis.³⁹ Persoalan tersebut adalah: (a). Kelompok menutup ide dari kelompok lain. (b). Anggota apatis pada dampak lain dari solusi kelompoknya. (c). Minoritas tidak diperhatikan dalam kelompok. (d). Tidak peduli pendapat ahli di luar kelompok. (e). Selektif memilih informasi untuk mendukung solusi yang direncanakan. (f). Kurang prediktif pada rencana solusi. Dari persoalan tersebut, Janis menyodorkan tawaran yakni: (a). Semua orang aktif berpartisipasi. (b). Pemimpin kelompok tidak menetapkan sepihak. (c). Menyusun pembagian kerja dalam penyelesaian solusi. (d). Pembagian kelompok kerja. (e). Konsultasi persoalan dengan di luar kelompok. (f). Mengundang pakar. (g). Masing-masing anggota diposisikan sebagai ekual. (h). Mengamati perubahan/perkembangan persoalan. (i). Mengevaluasi keputusan yang ada.

Merujuk pada teori *groupthink* tersebut maka wacana sertifikasi khotib memungkinkan dan berpotensi pada terjadinya perdebatan di kalangan organisasi

³⁹ Stephen W. Littlejhon, Teori Komunikasi, (Jakarta: Salemba Pustaka. 2011), hlm. 281.

keagamaan. Apalagi, kita tengah hidup di era modern yang mana suatu pesan komunikasi maupun gagasan keagamaan yang disampaikan pada publik bisa dipastikan berjumpa dengan beragam pendapat. Inilah yang dimaksud oleh Hermin bahwa komunikasi yang disampaikan kepada masyarakat secara otomatis akan mengundang keriuhan komunikasi. Keriuhan ini terjadi oleh karena tidak adanya sistem yang mengatur lantaran semua bicara dan semua menanggapi atau merespon. Selanjutnya mengemuka hanyalah egoisme yakni, memandang diri sebagai paling benar dan yang datang dari luar dianggap salah. Di sinilah pentingnya pertemuan sistem sehingga komunikasi maupun gagasan tersampaikan secara sehat. Alih-alih komunikasi akan berjumpa dengan *homopili* (kesamaan pandangan atau penyatuan pedapat) justru yang tidak bisa dihindari adalah keriuhan komunikasi.⁴⁰ Dengan demikian komunikasi maupun wacana akan selalu berhadapan dengan *porositypili* (poros pendapat), *hybridpili* (campuran pendapat).

Maksudnya, konsep ini dapat digunakan untuk memperjelas bentuk dari refleksi pemikiran organisasi keagamaan di Pamekasan misalnya terkait dengan hal apa masing-masing organisasi memiliki kesamaan pandangan (*homopili*) tentang sertifikasi khotib, dalam hal apa organisasi keagamaan di Pamekasan kontra pandangan (*porositypili*) tentang sertifikasi khotib, serta dalam hal apa organisasi keagamaan di Pamekasan memposesikan sebagai agen yang netral terhadap wacana sertifikasi khotib. Netralitas yang dimaksud dalam konsep ini adalah kesamaan

⁴⁰ Hermin Indah Wahyuni, *Keriuhan Komunikasi*, (Jakarta: Pustaka Obor, 2020), hlm. 3.

pandangan organisasi keagamaan di Pamekasan tetapi masing-masing organisasi merekomendasikan syarat-syarat yang harus dipenuhi (*hybridapili*).

Refleksi pemikiran kelompok ini selanjutnya mengantarkan pada kondisi masing-masing pemikiran sama-sama mengklaim kebenarannya sendiri. Meskipun demikian, bila ditelisik lebih dalam maka sebetulnya fenomena ini pada kenyataannya merupakan pengaruh berlebihan dari satu orang atau lebih yang kemudian direfleksikan sebagai suara kelompok yang sebenarnya juga mengarah pada terbentuknya ketidaktahuan ataupun ketidakpahaman secara utuh pada permasalahan. Dalam diri manusia terdapat kecenderungan bahwa manusia jarang menyadari ketidakpahaman yang sedang dilanda tersebut.

Hal ini terjadi karena manusia cenderung mengunci diri dalam *echo chamber* (suatu informasi yang tersebar melalui media dan yang terus-menerus dipopulerkan oleh kelompok). Dengan begitu, manusia menggemarkan apa yang diyakini sebagai kepercayaan yang paling memiliki kebenarannya sendiri sehingga selanjutnya hanya akan mengulang-ulang apa yang mereka pahami. Rasionalitas individu akan sulit terbentuk akibat terbentuknya komunal *grupthink*. Artinya, masyarakat kadang tidak menyadari bahwa pandangan atau kepercayaan mereka pada sesuatu sebenarnya merupakan cara berpikir komunal yang sangat jarang akan ditentang sebab sudah dianggap sebagai kebenaran yang tidak perlu didiskusikan. Apalagi dalam beberapa isu, kebanyakan orang tidak menyukai terlalu banyak data karena merasa digurui dan diposisikan sebagai pihak yang tidak paham. Mereka kemudian akan sulit mencapai

rasionalitas yang paling optimal karena sudah memiliki pijakan posisi dan pemikirannya sendiri.

5. Teori Kontrol Sosial

Sosial kontrol merupakan pengendalian sosial yang mencakup segala proses bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku.⁴¹ Menurut Reiss dalam Soerjono Soekanto, kontrol sosial memiliki dua konsep. *Pertama*, konsep personal control yaitu seberapa kuat seseorang bertahan untuk tidak mempergunakan metode yang tidak disetujui secara sosial dalam mencapai tujuannya. *Kedua*, konsep social kontrol yaitu kemampuan kelompok atau lembaga sosial untuk membentuk norma atau aturan tertentu.⁴² Mengacu pada konsep sosial kontrol ini maka wacana sertifikasi khotib bagian dari cara pemerintah melalui *apparatus statenya* yaitu Kemenag RI mengatur khotib agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku di Indonesia.

Konsep yang disampaikan Reiss menunjukkan sikap mempertahankan yang dianggapnya strategi yang tepat dalam mencapai tujuan yang diinginkanya, dan kemampuan dalam memaksimalkan fungsi organisasi kelompok sehingga terjadi efektifitas kegiatan dengan memperhatikan norma yang berlaku. Reckless berpendapat dengan mengaktifkan segala yang menjadi instrument atau indikator pendukung suatu tujuan dapat berjalan efektif dan efisien mencapai suatu

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Penyimpangan*, (Jakarta: Rajawali, 1988).

⁴² Soekanto Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1982).

keberhasilan. Norma sosial yang tidak baik dapat dilakukan pencegahan dengan membentengi diri dari segala macam dorongan kejahatan.⁴³

Menurut Travis Hirschi⁴⁴ masyarakat memiliki keterikatan dengan empat ikatan sosial (*social bond*): *Pertama*, *attachment* yaitu kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Kalau *attachment* ini sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain. *Kedua*, *commitment* yaitu keterikatan seseorang dengan sub sistem konvensional seperti instansi atau institusi, pekerjaan, organisasi, dan sebagainya. Komitmen merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan sosial. *Ketiga*, *involvement* yaitu merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan penyimpangan. *Keempat*, *Belief* merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial yang meneguhkan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada dan mengurangi hasrat untuk melanggar.



⁴³ *Ibid.* Soekanto (1988).

⁴⁴ Lihat Stuart H Traub and Craig B.Little, *Theories of Devience*, Third Edition, State University of New York, 1985, hlm.257. Lihat pula JE Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992), hlm.20.

F. Metode Penelitian

Karya ilmiah ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini sangat cocok digunakan oleh peneliti yang hendak menyajikan gambaran terhadap suatu fenomena menurut pandangan suatu komunitas. Menurut Creswell tradisi studi fenomenologi adalah “*Whereas a biography report the life of a single individual a phenomenological study describes the meaning of the life experiences for several individual about a concept or the phenomenon.*”⁴⁵ Dengan demikian, suatu penelitian yang menggunakan tradisi fenomenologi sebetulnya tengah berupaya untuk menjelaskan makna tentang suatu gejala maupun konsep termasuk konsep diri atau pandangan hidup mereka sendiri. Pandangan Moleong menegaskan bahwa fenomenologi berasumsi peneliti tidak mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang diteliti sehingga inkir fenomenologis mengawali dengan diam guna menangkap pengertian sesuatu yang diteliti. Oleh sebab itu, peneliti berusaha masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang diteliti sedemikian rupa sehingga peneliti dapat memahami apa dan bagaimana suatu pengertian dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁶ Mulyana menyebutkan bahwa pendekatan fenomenologi termasuk pada pendekatan subjektif atau interpretatif.⁴⁷

⁴⁵ Jhon W. Criswell. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions.* (USA: Sage Publications Inc. 1998), h. 51.

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h. 9.

⁴⁷ Deddy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001), h. 59.

Fenomenologi merupakan upaya pemberangkatan dari metode ilmiah yang berasumsi bahwa eksistensi suatu realitas tidak diketahui dengan pengalaman biasa dan dihayati secara aktual sebagai data dasar suatu realitas. Artinya, jika kaum positivistik meyakinkan orang dengan menunjukkan bukti yang nyata terjadi maka kaum fenomenolog meyakinkan orang lain dengan gejala-gejala. Atas dasar ini maka fenomenologi dapat dikatakan sebagai lukisan gejala tidak dengan benda-benda melainkan dengan fenomena seperti mengemukanya diskursus sertifikasi khotib. Fenomenologi menjelaskan fenomena dan maknanya dengan melakukan wawancara pada objek penelitian dalam hal ini pengurus SI, Muhammadiyah, dan NU Pamekasan. Fenomenologi menjelaskan struktur kesadaran dan pengalaman manusia melalui sebuah pendekatan yang berupaya membiarkan realitas mengungkapkan dirinya sendiri secara alami. Lewat pertanyaan “pancingan”, subyek penelitian dalam konteks ini pengurus organisasi keagamaan di Pamekasan dibiarkan menceritakan segala macam dimensi pengetahuan yang berkaitan dengan fenomena penceramah. Dalam memahami fenomena, fenomenologi mengajukan beberapa langkah. *Pertama*, melihat fenomena sebagai esensi (fenomena murni). Fenomenologi melakukan reduksi atau sejenis abstraksi dalam melihat suatu dan menutup hal lain.

Suatu fenomena yang diteliti dengan menggunakan tradisi penelitian fenomenologi bersifat subjektivitas dan obyektivitas. Bersifat subjektif artinya peneliti mengurai fenomena berdasar penuturan obyek penelitian yang mengalami fakta atau fenomena itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud bersifat objektif berarti

peneliti menyelidiki tentang bagaimana gejala tersebut dapat mengemuka atau terjadi.⁴⁸ Hal ini bisa dilakukan melalui *epoce* dan *editik*. *Epoce* adalah proses di mana si peneliti menangguhkan atau menunda penelitian terhadap fakta atau fenomena yang diamatinya walaupun ia telah memiliki prakonsepsi atau penelitian tertentu sebelumnya. Dalam artian membiarkan fenomena itu berbicara apa adanya tanpa intervensi penilaian baik-buruk, postif-negatif, dan bermoral-tidak bermoral menurut peneliti. *Editik* adalah memahami fenomena melalui pemahaman atas ungkapan-ungkapan atau ekspresi yang dikemukakan subjek. Dalam hal ini, peneliti mengedepankan empati dan mencoba memasuki wilayah pengalaman pemikiran subjek dengan proses imajinatif. Penelitian yang menggunakan tradisi penelitian fenomenologi memiliki ciri tersendiri dalam prosedur penelitian, pengumpulan data, dan analisis data berikut:

1. Prosedur Penelitian

Tradisi penelitian fenomenologi mencari jawaban tentang makna dari suatu fenomena. Moustakas menyatakan bahwa prosedur penting dalam tradisi penelitian fenomenologis adalah tahapan-tahapan berikut:⁴⁹ (1). Menetapkan lingkup fenomena yang akan diteliti. Artinya, peneliti berusaha memahami perspektif filosofis di balik pendekatan yang digunakan terutama konsep mengenai kajian bagaimana orang mengalami suatu fenomena yang hendak dikaji melalui informan. (2). Menyusun

⁴⁸ *Ibid.* Jhon W. Criswell., 1998, h. 51.

⁴⁹ Clark Moustakas, *Phenomenological Research Methods*, (New Delhi: Sage Publications, 1994), hlm. 235-237.

daftar pertanyaan. Peneliti menuliskan pertanyaan penelitian yang mengungkap makna pengalaman bagi para individu serta menanyakan kepada mereka untuk menguraikan pengalaman penting setiap harinya. (3). Pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan data dari individu yang mengalami fenomena yang diteliti. (4). Analisis data. Penelitia melakukan analisis data fenomenologis. (5). Tahap deskripsi esensi. Peneliti mengonstruksi dan medeskripsi secara menyeluruh mengenai esensi perasaan subyek penelitian. (6). Laporan penelitian. Laopran ini memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pembaca tentang bagaimana seseorang merasakan fenomena tersebut.

2. Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data utama dalam tradisi fenomenologi menurut Criswell adalah wawancara mendalam dengan subjek penelitian.⁵⁰ Pada tahap ini, peneliti melakukan wawancara dengan pimpinan organisasi keagamaan mulai wawancara dengan pimpinan SI, Muhammadiyah, dan NU di Pamekasan sampai wawancara dengan beberapa inisiator kegiatan dakwah di Pamekasan. Guna memperoleh hasil wawancara yang utuh maka wawancara peneliti dengan narasumber direkam. Kelengkapan data dapat diperlukan dengan menggunakan teknik lain seperti observasi, partisipan, penelusuran dukumen, dan lain-lain buku bacaan dan diskusi.⁵¹ Pada babak ini penulis memperlukan hasil wawancara dengan

⁵⁰ Jhon W. Creswell, *Qualitative Inquiry: Choosing Among Five Tradition*, (New Delhi: Sage Publication, 1998), hlm. 54.

⁵¹ *Ibid.* 55.

para narasumber tersebut melalui dialog lanjutan lewat telepon dan menelusuri data-data yang tersaji dalam media dan bahan bacaan lainnya.

3. Analisis Data

Cara peneliti melakukan analisis data dalam tradisi penelitian fenomenologi melalui tahapan-tahapan. Menurut Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln tiga tahap.⁵² Tahap pertama, peneliti mendeskripsikan sepenuhnya fenomena yang dialami subjek penelitian. Dengan demikian, seluruh rekaman hasil wawancara mendalam dengan subjek penelitian ditranskripsikan ke dalam bahasa tulisan. *Kedua*, tahap *horizontalition* dari hasil transkripsi. Peneliti menginventarisasi pertanyaan-pertanyaan penting yang relevan dengan topik penelitian. Pada tahap ini peneliti harus sabar untuk menunda penelitian agar unsur subjektivitas peneliti jangan sampai mencampuri poin-poin penting sebagai data penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara. *Ketiga*, tahap *cluster of meaning*. Peneliti mengklasifikasikan pertanyaan-pertanyaan ke dalam tema-tema atau unit-unit makna serta menyisihkan pernyataan yang tumpang tindih atau berulang-ulang.

Pada tahap ini penulis menuangkan hasil wawancara dengan para narasumber pada bentuk tulisan kemudian peneliti memperbaiki penulisan terkait pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para narasumber. Selanjutnya, hasil wawancara tentang pernyataan-pernyataan dari narasumber yang tumpang tindih dihilangkan agar pernyataan para narasumber lebih sistematis. Aspek-aspek pernyataan tersebut

⁵² Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Straegies of Qualitative Inquiry*, (Thousand Oaks: Sage publications, 1988), hlm. 64.

antara lain menyangkut pendapat, penilaian, perasaan, harapan, serta respon subjektif lainnya dari subjek penelitian berkaitan dengan pengalamannya tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematisasi penulisan dalam penelitian ini dikemas menjadi empat bab dimaksudkan guna keteraturan pemikiran serta memudahkan sajian pembahasan dalam karya ilmiah ini. Bab pertama berisi tentang latar belakang mengapa tema “Diskursus Sertifikasi Khotib: Pandangan Organisasi Keagamaan di Pamekasan” sangat layak dan menarik untuk diurai secara ilmiah. Setelah masalah diuraikan, penulis membuat rumusan masalah yang kemudian menjadi fokus serta mencantumkan manfaat penelitian agar dapat berkontribusi, baik secara akademis maupun praktis. Selanjutnya, penulis menganalisis sejauh mana kajian tentang sertifikasi khotib serta melakukan *critical review* pada kajian-kajian yang telah dilakukan. Setelah itu, penulis mengurai kerangka teoritis guna membantu menganalisis data yang didapatkan di lapangan. Dilanjut dengan, penulis menjelaskan langkah-langkah metodologis untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Di puncak bab pertama dijelaskan sistematika penulisan yang merupakan kerangka isi, alur logis, dan argumentasi penulis mengenai tata urutan bagian-bagian yang membingkai seluruh pembahasan.

Bab kedua, menyajikan realitas nasionalisme dan relegiusitas masyarakat Pamekasan. Sajian tersebut dimaksudkan menjadi landasan mengapa penelitian tentang sertifikasi khotib ini dilakukan di Kabupaten Pamekasan sebab Kota

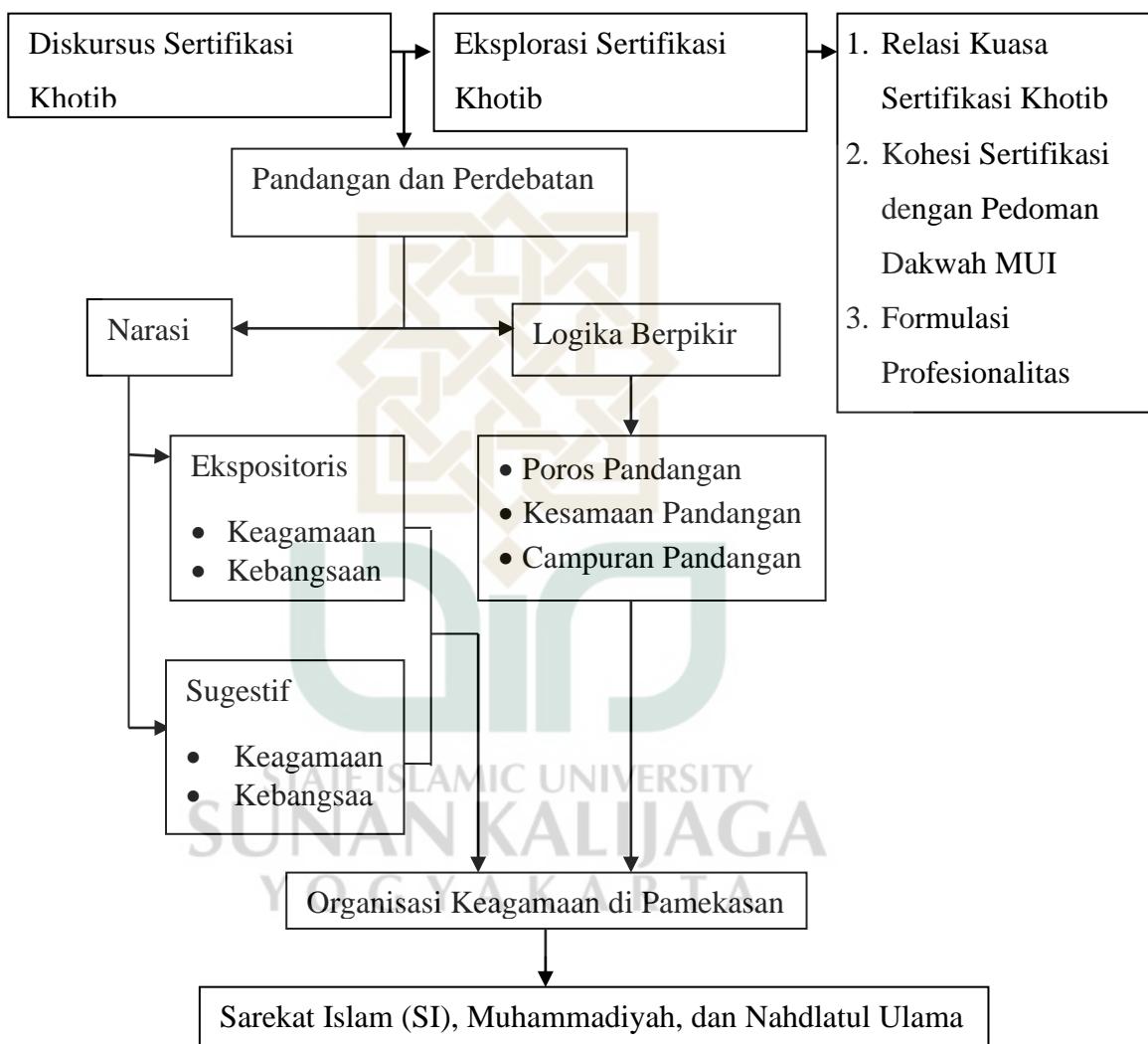
Pamekasan memang memiliki sosial keagamaan dan kebangsaan yang berbeda dibanding tiga Kabupaten lainnya yang ada di Pulau Madura yakni, Bangkalan, Sampang, dan Sumenep.

Bab ketiga, penulis menyajikan tentang hasil analisis atau temuan dalam penelitian ini. Dengan kata lain, penulis akan memaparkan bagaimana keagamaan dan kebangsaan dinarasikan oleh organisasi keagamaan yakni, Sarekat Islam (SI), Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU) Pamekasan tentang wacana sertifikasi khotib. Pada bab ini pula sekaligus penulis berusaha mengungkap pandangan dan perdebatan yang terjadi di kalangan organisasi keagamaan di Kota Pamekasan tentang wacana sertifikasi khotib yang telah digulirkan oleh Kemenag RI. Bab empat sebagai bab pamungkas, pada bab tersebut penulis akan menyajikan kesimpulan dari penulisan karya ilmiah ini.



H. Kerangka Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka model penelitian yang akan dilakukan penulis dapat disederhanakan dalam bentuk bagan berikut:



I. Operasional Konsep Penelitian

Setelah peneliti menggambarkan model penelitian maka selanjutnya penjelasan mengenai model penelitian tersebut disajikan dalam bentuk kerangka konsep. Tujuan peneliti dalam membuat kerangka konsep ini adalah untuk menjabarkan operasionalisasi dari konsep-konsep yang telah disusun. Kerangka konsep ini disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Konsep	Operasionalisasi
Diskurus Sertifikasi Khotib	Diskursus dalam penelitian ini merujuk pada program sertifikasi khotib yang telah diwacanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) sejak tahun 2017. Sertifikasi khotib yang dimaksud adalah langkah Kemenag untuk mencetak khotib-khotib yang memiliki kualifikasi pengetahuan keagamaan dan kebangsaan, kompeten serta profesional dalam mensyiaran pesan-pesan Agama Islam yang ditandai dengan sertifikat. Bagi Foucault, suatu diskursus tidak berdiri sendiri tetapi ada relasi kekuasaan-pengetahuan di dalamnya. Kekuasaan berkaitan dengan praktik dengan cara membuat aturan-aturan. Sedangkan aturan merujuk pada pedoman dakwah MUI yang diterbitkan secara bersamaan dengan munculnya wacana sertifikasi khotib pada tahun 2017. Adapun pengetahuan berkaitan dengan sejarah serta hubungan-hubungan yang mendukung hingga ke arkeologis mengapa wacana tersebut muncul. Analisis terhadap suatu diskursus bagi Giddens tidak bisa dipisahkan dari struktur dan agen agar

	<p>kemudian suatu diskursus menjadi sesuatu yang betul-betul terlaksana.</p> <p>Pamekasan dipilih sebagai objek penelitian dalam penelitian ini, berkaitan dengan kekhasan yang ada di Kota Pamekasan dalam hal kepatuhan terhadap kiai, mayoritas masyarakatnya yang mengenyam pendidikan pesantren, fenomena keagamaan yang tidak hanya didominasi satu organisasi keagamaan, ceramah keagamaan yang diisi oleh kiai-kiai lokal di pedesaan, serta tradisi keagamaan yang kental sebagai daya tarik dari daerah tersebut.</p>
Pandangan dan Perdebatan	Pandangan dan perdebatan yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah gambaran dan paparan penulis dalam mengungkap narasi serta logika berpikir yang digunakan organisasi keagamaan di Pamekasan tentang wacana sertifikasi khotib sebagai kajian dalam penelitian ini.
Eksplorasi Sertifikasi Khotib	Eksplorasi yang dimaksud penulis dalam penelitian ini merupakan penggalian penulis terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan wacana sertifikasi. Dengan demikian, untuk mengeksplorasi sertifikasi khotib penulis menyelidiki wacana tersebut pedoman dakwah MUI, relasi kuasa foucauldian, konsep profesionalitas khotib, serta mengkontekstualisasikan wacana sertifikasi ini dengan dakwah multikultural
Narasi	Narasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembingkaian atau rasionalitas yang diperlakukan oleh organisasi keagamaan di Pamekasan. Sebagaimana dinyatakan oleh Keraf bahwa rasionalisasi merupakan suatu proses pembuktian yang umum digunakan untuk

	<p>membenarkan suatu wacana melalui narasi. Kebenaran yang yang dibicarakan dalam rasionaliasi bukanlah suatu kebenaran mutlak melainkan kebenaran yang hanya bisa jadi berfungsi untuk meletakkan dasar-dasar dan melicinkan jalan agar keinginan, sikap, kepercayaan, keputusan, atau tindakan yang telah diwacanakan dapat dilegitimasi sebagai sebuah kebenaran.</p> <p>Maksud penelitian ini akan mengaitkan diskursus sertifikasi khotib dengan rasionalitas yang dipraktikkan oleh organisasi keagamaan di Pamekasan. Bentuk-bentuk rasionalitas tersebut dapat berupa narasi keagamaan dan kebangsaan yang digunakan oleh organisasi keagamaan di Pamekasan.</p>
Logika Berpikir	<p>Logika berpikir (<i>Groupthink</i>) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggunaan logika yang ditempuh oleh tiap-tiap organisasi keagamaan di Pamekasan tentang diskursus sertifikasi khotib yang diwacanakan oleh Kemenag RI. Sebagaimana dinyatakan Irving Janis pencetus teori <i>groupthink</i> (logika berpikir kelompok) bahwa setiap kelompok memiliki pemahaman tersendiri dalam memandang suatu fenomena yakni, wacana sertifikasi khotib.</p> <p>Konsep ini akan digunakan untuk mengeksplorasi bentuk dari <i>groupthink</i> organisasi keagamaan di Pamekasan misalnya terkait dengan dalam hal apa masing-masing organisasi keagamaan satu pendapat tentang sertifikasi khotib, dalam hal apa organisasi keagamaan di Pamekasan kontra rasionalitas tentang sertifikasi khotib, serta dalam hal apa organisasi keagamaan di Pamekasan memposesikan</p>

	sebagai agen yang netral terhadap wacana serifikasi khotib. Netralitas yang dimaksud dalam konsep ini adalah kesamaan pandangan organisasi keagamaan di Pamekasan tetapi masing-masing organisasi merekomendasikan syarat-syarat yang harus dipenuhi.
Organisasi keagamaan	Organisasi keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Sarekat Islam (SI), Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU) cabang Pamekasan. Pemilihan terhadap tiga organisasi keagamaan tersebut lantaran pemahaman keagamaan yang diterima, diikuti, serta dipraktikkan oleh mayoritas masyarakat Pamekasan tidak lepas dari kebijakan-aturan dan syiar Islam yang disampaikan oleh tiga organisasi keagamaan tersebut.



BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengeksplorasi pandangan dan perdebatan organisasi keagamaan tentang diskursus sertifikasi khotib yang telah diwacanakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI) sejak tahun 2017 silam. Penelitian tentang diskursus sertifikasi khotib ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan tradisi fenomenologi dan teknik pengumpulan data wawancara yang diperdalam dengan observasi serta penelusuran dukumen.

Berdasarkan uraian dan eksplorasi pada bab-bab sebelumnya tentang diskursus sertifikasi khotib: pandangan organisasi keagamaan di Pamekasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan atau narasi keagamaan dan kebangsaan SI, Muhammadiyah, dan NU Pamekasan.
 - a. Dari sudut pandang keagamaan, SI menyajikan narasi bahwa Kemenag RI melalui program sertifikasi terlalu menyederhanakan ayat-ayat dakwah. Dari segi narasi kebangsaan, SI menilai sertifikasi khotib sebagai keran pembuka atas kontrol penguasa terhadap pesan-pesan Agama Islam. Sehingga bagi SI wacana program Kemang RI tersebut

dianggap sebagai upaya mengangkangi keluhuran dari tujuan dakwah itu sendiri.

- b. Adapun narasi keagamaan yang disajikan Muhammadiyah menganggap bahwa program sertifikasi khotib dapat menganggu misi kerasulan yang telah diembankan kepada setiap juru dakwah karena berpotensi mempersempit ruang gerak untuk mensyiaran ajaran Islam. Narasi kebangsaan yang disajikan Muhammadiyah menganggap program sertifikasi sebagai langkah berlebihan pemerintah untuk terlalu ikut campur mengatur wilayah yang sebaiknya tidak perlu disentuh. Bahkan bagi Muhammadiyah program sertifikasi khotib bukan menambah kedamaian berbangsa melainkan secara bersamaan semakin membuka ruang saling menfitnah dan mengancam otoritas juru dakwah.
- c. Sedangkan narasi keagamaan NU prihal diskursus sertifikasi khotib dianggap dapat menanggulangi pesan kebenaran syariat Islam disampaikan oleh oknum-oknum yang tidak memiliki pemahaman Agama mumpuni. Narasi kebangsaan yang disajikan NU menganggap secara doktrinal negara memiliki otoritas sehingga diskursus program sertifikasi khotib pantas diakui dan dijalankan oleh rakyat. Oleh karena itu, program

Kemang RI tersebut dianggap patut mendapatkan pengakuan secara wajar karena memiliki dasar moral yang dapat dipertanggungjawabkan, layak dihormati, dan patut untuk ditaati.

2. Perdebatan diskursus sertifikasi khotib di kalangan SI, Muhammadiyah, dan NU Pamekasan.

Perdebatan ini diklasifikasikan menjadi poros pandangan, kesamaan pandangan, dan campuran pandangan oleh karena penggunaan logika yang dibangun masing-masing organisasi keagamaan yang disajikan dengan sebagai berikut:

- a. Bentuk poros pandangan tentang diskursus sertifikasi khotib terlihat dari SI yang menilai dari munculnya wacana penyeragaman teks khutbah yang bersamaan dengan wacana sertifikasi khotib sehingga kemudian diindikasikan adanya pengendalian isi ceramah oleh pemerintah. Maka SI menginginkan agar program sertifikasi khotib tidak dilanjut agar pemerintah tidak bertendensi untuk menghalangi halangi kesakralan misi dakwah yang sejak awal diembankan kepada masing-masing umat Islam. Muhammadiyah berpegang pada keyakinan bahwa khotib pada hakikatnya sudah mengerti tentang sumber Islam

yang telah mengatur semuanya termasuk dalam cara menyampaikan pesan sehingga Muhammadiyah mempersolakan fungsi dari sertifikasi khotib jika terus dipaksakan untuk diprogramkan. Adapun dasar poros pandangan NU didasarkan pada kontribusi pemerintah untuk mewujudkan khotib profesional yang anti radikal dan ekstrimisme sehingga NU Pamekasan menilai program sertifikasi khotib sebagai strategi negara dalam mencetak khotib-khotib yang memiliki kompetensi tanpa eksrim dan radikal.

- b. Kesamaan pandangan SI, Muhammadiyah, dan NU tentang program sertifikasi khotib adalah terletak pada prihal praktiknya agar pemerintah atau Kemenag RI hanya sekadar menjadi fasilitator. Artinya, pemerintah dan isntansinya hanya cukup menyediakan fasilitas-fasilitas yang betul-betul berguna dalam mewujudkan penceramah profesional. Maka perwujudan program ini harus melibatkan ulama-ulama dari pondok pesantren, ormas-oramas, serta akademisi dan seluruh *stacholder* sebagai pemeran utama dalam prosesi program sertifikasi khotib.

- c. Campuran pandangan tentang sertifikasi terlihat dari perbedaan informasi atau isu lain yang sengaja dikaitkan oleh SI, Muhammadiyah, dan NU Pamekasan. SI mengaitkan wacana sertifikasi khotib dengan isu ketidakpuasan pemerintah terhadap konten ceramah khotib yang kemudian menyebakan penceramah tersandung hukum. Muhammadiyah mengaitkan diskurus sertifikasi khotib dengan informasi khotib-khotib yang telah dirilis pemerintah sehingga wacana Kemenag RI tersebut dinilai tidak akan transparan. NU mengaitkan diskursus sertifikasi khotib dengan informasi adanya negara lain yang telah melakukan program sertifikasi seperti Arab Saudi, Malaysia, dan Brunei yang dinilai sama sekali tidak ada pengendalian pesan keagamaan oleh rezim atau penguasa dan kepentingan politis tentu adanya keterlibatan seluruh elemen.

B. Saran

Penelitian tentang wacana sertifikasi khotib ini menghadirkan khazanah baru atas fenomena dakwah di Indonesia sehingga terlalu sederhana apabila diskursus sertifikasi khotib ini hanya dicukupkan pada pandangan dan perdebatan organisasi keagamaan. Terlebih penelitian ini dilakukan pada organisasi keagamaan di tingkat lokal. Di mana, Organisasi Keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pengurus Cabang Sarekat Islam (PCSI), Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM), dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan temuan data penelitian di lapangan maka penulis merekomendasikan beberapa penelitian lanjutan:

1. Organisasi keagamaan di tingkat Provinsi dan tingkat Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa obyek kajian dalam penelitian ini bersifat lokal yakni, di salah satu Kabupaten yang ada di Pulau Madura. Dengan demikian, perlu ada penelitian lanjutan agar lebih luas dan global dalam mengeksplorasi diskursus sertifikasi khotib seperti pandangan dan perdebatan organisasi keagamaan di tingkat pusat. Selain itu,
2. Selain aspek pandangan dan perdebatan, terdapat aspek lain yang menarik untuk dikaji secara ilmiah yakni, aspek manfaat program sertifikasi khotib terhadap Agama, kontribusi terhadap keutuhan NKRI, serta fungsi sertifikasi khotib terhadap penceramah dalam menanamkan pengetahuan keagamaan jamaah.

3. Selain itu, penelitian ini bisa dikembangkan dengan mengeksplorasi secara mendalam terkait pola pelaksanaan program sertifikasi khotib. Mengingat wacana yang diinisiasi oleh Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI) sebagai institusi keagamaan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang juga mendapat dukungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).



Dafta Pustaka

Buku

- Abda, Slamet Muhammin. *Prinsip-Prinsip Metodologi Dakwah*. Surabaya: al-Ikhlas. 1994.
- Alim, Muhammad. *Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- al Kattanie, Abdul Hayyi. dkk., *Teori Politik Islam. terj.* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Amin, Samsul Munir. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Bertens, K. *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*. Jakarta: Gramedia, 2001.
- Calne, Donald B. *Batas Nalar Rasionalitas & Prilaku Manusia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2004.
- Criswell, Jhon W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. USA: Sage Publications Inc. 1998.
- Denzin, Norman K dan Yvonna S. Lincoln. *Straegies of Qualitative Inquiry*. Thousand Oaks: Sage publications, 1988.
- Darajat, Zakiah. *Ilmu Jiwa Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Effendy, Bachtiar. *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan: Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani, dan Etos Kewirausahaan*. Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Eriyanto. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks di Media*. Jakarta: LKIS, 2003.

Fath, Kutwa. dkk. *Pamekasan dalam Sejarah*. Pamekasan: Karunia offset, 2004.

Fillingham, Lydia Alix. *Foucault untuk Pemula*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001.

Foucault, Michel. *Arkeologi Pengetahuan*. Jogjakarta: IRCiSoD, 2012.

Hefni, Harjani. *Komunikasi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Hasjmy, A. *Dustur Dakwah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Hodgson, Marshal. *The Venture of Islam: Conscience and History in World a Civilazition, The Classical Age of Islam*. Chicago: University of Chicago Press, 1947.

Ismail, Ilyas. *Filsafat Dakwah: Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.

Jager, Siegfried. *Discourse and Knowledge: Tehoritical and Methodological Aspect of a Critical Discourse and Dispositive Analysis*. Sage Publications, California, London & New Delhi. 2001.

Jonge, Huup De. *Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi dan Islam (Suatu Antropologi Ekonomi)*. Jakarta: PT Gramedia, 1989.

Kholiluddin, Tedi. *Kuasa Negara Atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus Agama Resmi dan Diskriminasi Hak Sipil*. Jakarta: RAS-AIL Media Group, 2009.

Keraf, Gorys. *Argumentasi dan Narasi*. Jakarta: Gramedia, 2004.

Knitter, Paul F. *One Earth Many Religion: Multifaith Dialouge and Global Responsibility*, Alih Bahasa Nico. A. Likumahuwa. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008.

- Koentjaraningrat. *Rintangan-rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Riset Kebudayaan Nasional, 1969.
- Littlejhon, Stephen W. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Salemba Pustaka. 2011.
- Mansurnoor, Arifin. *Islam: in An Indonesian World Ulama of Umara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.
- Mills, Sara. *Sebuah Piranti Analisis dalam Kajian Sosial*. Jakarta: Penerbit Qalam, 2007.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001.
- Muhaimin, dkk. *Paradigma Pendidikan Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Musa, Ali Mansyur. *Nasionalisme di Persimpangan*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Moustakas, Clark. *Phenomenological Research Methods*. New Delhi: Sage Publications, 1994. Creswell, Jhon W. *Qualitative Inquiry: Choosing Among Five Tradition*. New Delhi: Sage Publication, 1998.
- Quthb. *Sistem Pendidikan Islam*. Bandung: Al Ma'arif, 1993.
- Rakhmat, Jalaluddin dan Deddy Mulyana. *Komunikasi Antarbudaya: Panduan berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya*. Bandung: Rosdakarya, 2005.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Agama*. Jakarta: PT Grafindo Pustaka, 2012.

- Sahlan, Asmaun. *Muwujudkan Budaya Religius di Sekolah*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Sahetapy, JE., *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992.
- Sara Mils, Sara. *Discourse*. Routledge: Londen & New York, 2001.
- Saputra, Wahidin. *Pengantar Ilmu Dakwah*. Jakarta: Rajagrafindo, 2011.
- Soekanto, Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Penyimpangan*. Jakarta: Rajawali, 1988.
- Squires, Judith. *Culture, Equality, and Diversity*, In Paul Kelly, ed., *Multiculturalism Reconsidered*. Cambridge: Polity Press, 2002.
- Sulaisi. *Perilaku Memilih Masyarakat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Dalam Pemilihan Bupati Pamekasan Tahun 2008*. Tesis: Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.
- Sulaiman. *Sejarah Perjuangan Rakyat Sumenep Pada Perang Kemerdekaan 1945-1949*. Sumenep: Dewan Harian Cabang Angkatan 45, 1993.
- Takdir, Muhammad. *Konsep Modernisasi Pesantren*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2018.
- Tilar, H. A.R. *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Tim Sosiologi, *Sosiologi I Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Yudhistira, 2006.
- Traub, Stuart H., and Craig B.Little. *Theories of Devience*, Third Edition, State University of New York, 1985.

Wayuni, Hermin Indah. *Keriuhan Komunikasi*. Jakarta: Pustaka Obor, 2020.

Wertheim, WF. *Masyarakat Indonesia dalam Transisi, kajian Perubahan Sosial*. Diterjemahkan oleh Misbah Zulfa Ellizabet. Yogyakarta: Tiara Wacana 1999.

Wodak, Ruth & Michael Meyer. *Methods of Critical Discourse Analysis*. Sage Publications, California, London & New Delhi. 2001.

Jurnal

Afandi, Sulfan. *Perjuangan Rakyat Pamekasan Mempertahankan Kemerdekaan dalam Agresi Militer Belanda 1 Di Madura Tahun 1947*. *Avatarra, Jurnal Pendidikan Sejarah*. Vol. 4 No. 2 Juli 2016.

Annur, Saipul. *Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Ulama di Kota Palembang*. Medina-Te Vol. 18 No. 1 Juni 2018.

Arifin, Rifqi Khairul. *Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru*. *Politicon* Vol. 1 No2. Desember 2019.

Bahasoan, Aminah dan Amir Faisal Kotarumalos. *Praktek Relasi Wacana dan Kuasa Foucauldian dalam Relasi Multi Profesi di Indonesia. Populis*, Volume 8 No. 1 Maret 2014.

Fahrurrozi. *Sertifikasi atau Standarisasi Khatib? Respon Para Dai di Kota Mataram*. *Jurnal Komunikasi* Vol. 08, No. 01 Juni 2018.

Haryatmoko. *Kekuasaan Melahirkan Anti Kekuasaan. Basis*, Volume 1 No. 2 Januari 2002.

Kholili, HM. *Dakwah Kultural dan Dakwah yang Ramah: Rancangan Komunikasi Untuk Dakwah*. *Annual Conference for Muslim Scholars Kopertais Wilayah IV Surabaya*. Proceeding ANCOMS 2017.

Muhtadi, Asep S. *Komunikasi Lintas Agama: Mencari Solusi Konflik Agama. International Conference on Islam in Malay World IX, Krabi, Thailand.* Conference Proceeding ICONIMAD 2019.

Novianto, Kholid dan Jaswadi. *Gaya Retorika Dai dan Perilaku Memilih Penceramah. Jurnal Komunikasi Islam* Vol 4 No. 1 Juni 2014.

Purnomo, Agus. *Politik Hukum Elite Politik Kabupaten Pamekasan Tentang Perda Syari'at. Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, Juni 2014.

Zuhriyah, Luluk Fikri. *Dakwah Inklusif Norcholish Madjid. Jurnal Komunikasi* Vol. 2. No.2, Desember 2012.

Sumber Elektronik

Bahri, S. (2017 Februari). Tanggapi wacana sertifikasi khatib, MUI ajukan tiga syarat. Diakses dari <https://www.dakwatuna.com/2017/02/06/85428/tanggapi-wacana-sertifikasi-khatib-mui-ajukan-tiga-syarat/#axzz5RG9drBHz>.

Sumber Lain

Kompas, *MUI ikut Menjaga Kesepakatan Nasional*, (28 November 2020).

Zubaidi. *Sertifikasi Kompetensi Khatib*. (Gatra, Maret 2017).

Wawancara

Wawancara dengan RH. Badrul Tamam selaku Bupati Kabupaten Pamekasan Periode 2018-2023 pada 21 Mei 2021.

Wawancara dengan Syafiuddin selaku Ketua GP Ansor Pamekasan sekaligus Wakil Ketu DPRD periode 2019-2024 pada 25 Mei 2021.

Wawancara dengan Sayuri Rustan selaku Dewan Pimpinan (DPC) Sarekat Islam (SI) Pamekasan pada 5 Februari 2021.

Wawancara dengan Daeng Ali Taufik, selaku Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Pamekasan pada tanggal 6 Februari 2021.

Wawancara dengan Taufik Hasyim selaku ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pamekasan, pada 4 Februari 202.

Wawancara dengan Ali Hasbullah sebagai sekretaris Fokus pada 5 Maret 2021.

